



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2018 – 2023

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke khadirat Allah SWT karena atas berkat serta rahmatnya kami telah menyelesaikan penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Renstra merupakan acuan bagi BKAD Kab. Sumedang untuk melaksanakan program dan kegiatan pada urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Sumedang.

Penyusunan rancangan akhir Renstra berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan BKAD Kab. Sumedang dan berfokus pada upaya pencapaian target-target RPJMD Kab. Sumedang Tahun 2018-2023. Di samping itu, pencapaian target harus memperhatikan pula target-target nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 serta mempertimbangkan rencana strategis yang disusun oleh kementerian terkait.

Akhir kata, semoga rancangan akhir Renstra BKAD Kab. Sumedang Tahun 2018-2023 dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di BKAD Kab. Sumedang.

Sumedang, Januari 2022
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang,



Ir. INE INAJAH, M.SE., M.Sc.
Pembina TK I/IVb
NIP 19690315 199901 2 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke khadirat Allah SWT karena atas berkat serta rahmatnya kami telah menyelesaikan penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Renstra merupakan acuan bagi BKAD Kab. Sumedang untuk melaksanakan program dan kegiatan pada urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Sumedang.

Penyusunan rancangan akhir Renstra berpedoman pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan BKAD Kab. Sumedang dan berfokus pada upaya pencapaian target-target RPJMD Kab. Sumedang Tahun 2018-2023. Di samping itu, pencapaian target harus memperhatikan pula target-target nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 serta mempertimbangkan rencana strategis yang disusun oleh kementerian terkait.

Akhir kata, semoga rancangan akhir Renstra BKAD Kab. Sumedang Tahun 2018-2023 dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di BKAD Kab. Sumedang.

Sumedang, Januari 2022
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang,



Ir. INE INAJAH, M.SE., M.Sc.
Pembina TK I/IVb
NIP 19690315 199901 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR BAGAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	11
1.4. Sistematika Penulisan	11
1.5. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD	13
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	14
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	14
2.2. Sumber Daya	23
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	33
3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	33
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	39
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	41
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	43
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	43
4.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	49
5.1.1. Strategi	49
5.1.2. Arah Kebijakan	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	57
6.1. Rencana Program Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang	57
6.2. Rencana Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Dua Tahun Kedepan	57

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	86
	7.1. Indikator Kinerja BKAD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	86
BAB VIII	PENUTUP	88

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur	24
Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan	24
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	25
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan	25
Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin.....	26
Tabel 2.6. Jumlah Pegawai Menurut jenis Kelamin dan Jabatan	26
Tabel 2.7. Jumlah Aset/ Modal	27
Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
Tabel 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD.....	29
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33
Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran	38
Tabel 3.3. Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait serta Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kab. Sumedang	40
Tabel 3.4. Isu Strategis dalam Badan Keuangan dan Aset Daerah	41
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD.....	45
Tabel 4.2. Penetapan Indikator Utama	48
Tabel 5.1. Matriks Analisis SWOT	49
Tabel 5.2. Analisis SWOT atas Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal	51
Tabel 5.3. Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah KebijakanJangka Menengah	54
Table 5.4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan BKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023	56
Tabel 6.1. Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah ..	62
Tabel 7.1. Indikator Kinerja BKAD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	86

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar 1.1.1. Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004	3
Daftar Gambar 1.1.2. Proses Penyusunan Renstra BKAD Kabupaten Sumedang Periode 2018- 2023.....	6
Daftar Gambar 1.1.3. Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	13

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1.1	Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang	15
Bagan 4.1.1.	Analisa Pohon Masalah	43
Bagan 4.1.2.	Analisa Pohon Tujuan	43
Bagan 4.1.3.	Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Makna esensial yang terkandung di dalamnya adalah memberi kewenangan yang luas dan nyata serta tanggungjawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya operasional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pemberdayaan daerah dalam rangka pengelolaan dan pengembangan daerah diwujudkan dengan Otonomi Daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi keleluasaan (*diskresi*) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Untuk itu pola pembangunan yang harus dikembangkan di masa yang akan datang tidak hanya semata mengutamakan tingginya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) melainkan untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis. Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan mengembangkan potensi diri dengan meningkatkan produktivitas Sumber Daya Manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peningkatan peran pemerintah yang efektif dan optimal sebagai fasilitator, regulator dan katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing serta terjaganya mekanisme pasar.

Pada akhir tahun 2019 terjadi pandemi Covid-19 di Indonesia. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pertama kali mengumumkan kasus PDP pada tanggal 22 Maret 2020. Seiring dengan ditetapkannya Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan. Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19; Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka sebagai tindak lanjut peraturan dimaksud di Kabupaten Sumedang telah dilakukan perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. Perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 34

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah inilah diperlukan adanya pedoman atau acuan kerja yang disebut dengan **Rencana Strategis**. Rencana Strategis (*Renstra*) merupakan salah satu bentuk perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang berkaitan dengan isu strategis dan operasional, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pembangunan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Renstra sangat penting bagi suatu unit organisasi dalam membantu penentuan arah dan masa depan organisasi. Organisasi akan mampu mengevaluasi, memilih dan mengimplementasikan berbagai alternatif pendekatan untuk membiayai dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Berkaitan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, yang menjadi landasan hukum berdirinya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dimana sebelumnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Beberapa pengertian mengenai Renstra adalah sebagai berikut:

1. **Rencana Strategis** merupakan suatu proses untuk menjawab satu pertanyaan pokok yaitu "Apa yang akan diperbuat". Sebagai suatu proses, ia menentukan apa yang dikehendaki suatu organisasi di masa depan dan bagaimana usaha mencapainya, suatu proses yang menjelaskan sasaran-sasaran. Dalam arti lain dapat dipertegas bahwa Rencana Strategis merupakan komponen manajemen strategis yang bertugas untuk memperjelas tujuan dan sasaran organisasi, memilih berbagai kebijakan organisasi, terutama dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber daya serta menciptakan suatu pedoman dalam menterjemahkan kebijakan organisasi.
2. **Rencana Strategis** adalah suatu cara untuk mengurangi resiko, suatu instrumen untuk mendidik para staf dan pimpinan serta menawarkan metode untuk memformulasikan dan mengimplementasikan keputusan strategis.
3. **Rencana Strategis** adalah sebagai suatu metode dalam mengarahkan para pemimpin unit kerja sehingga keputusan-keputusan dan tindakan yang dilakukan mempunyai pengaruh positif terhadap masa depan organisasi secara konsisten dan rasional.
4. **Rencana Strategis** adalah suatu kerangka berpikir logis yang menetapkan dimana kita berada, kemana kita akan pergi dan bagaimana kita bisa sampai disana. Juga merupakan proses yang mengarahkan untuk mengembangkan visi dalam menggambarkan masa depan yang dikehendaki. Ia mengubah cara berpikir, mengalokasikan dan merealokasikan berbagai sumber daya sementara pelaksanaan program berlangsung. Dengan kata lain Rencana Strategis berhubungan dengan

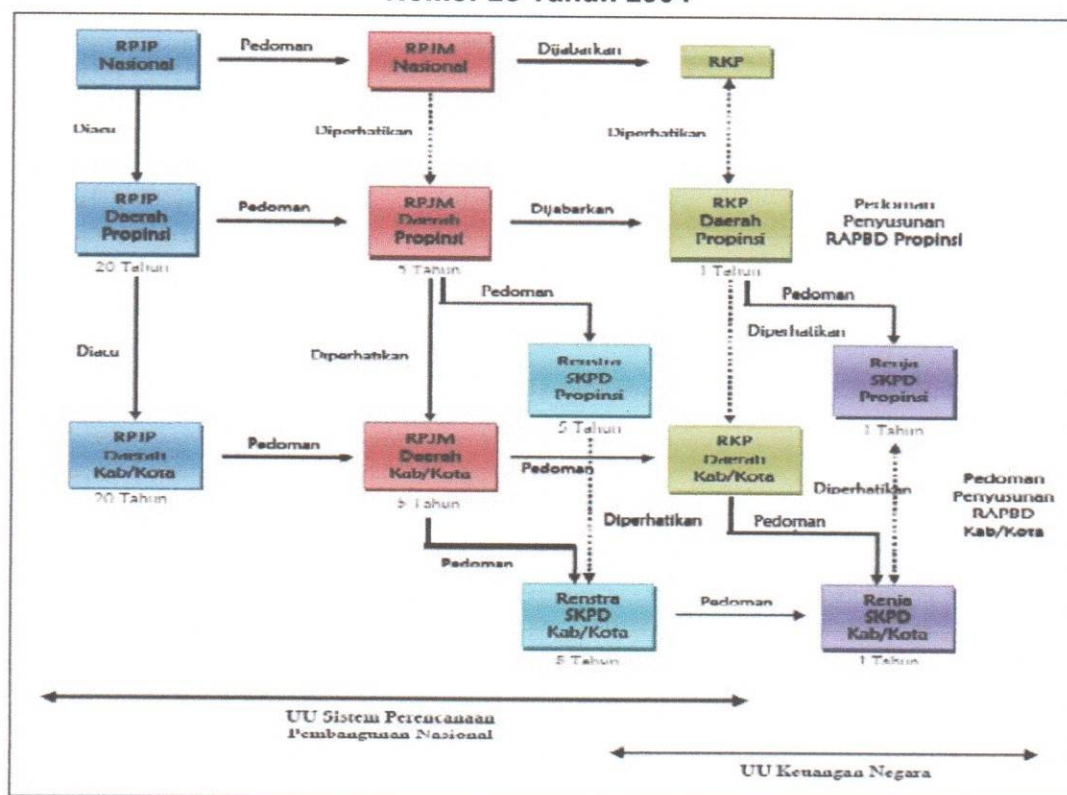
dampak masa depan dari keputusan yang dibuat sekarang, atau disebut sebagai futurity of current decisions. Ia mencakup pilihan-pilihan yang berkaitan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Ia juga merangkul kekuatan-kekuatan eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Bahkan Rencana Strategis adalah falsafah, yaitu suatu sikap, a way of life, suatu proses berpikir, suatu aktivitas intelektual.

5. **Rencana Strategis** dapat dipandang sebagai suatu proses yang dapat digunakan untuk membayangkan, memvisualisasikan masa depan organisasi, kemudian mengembangkan struktur, prosedur dan operasionalisasi serta pengendalian organisasi sehingga dapat mencapai masa depan yang diinginkan.

Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, merupakan bagian integral dan saling berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 yang sifatnya terbuka dan saling berhubungan dengan dokumen perencanaan lainnya. Sifat terbuka disini adalah dimaksudkan terbuka dalam menerima informasi baru serta terbuka dalam menerima koreksi. Sementara itu, Rencana Strategis saling berhubungan dengan dokumen perencanaan lainnya karena ada informasi penting yang selalu mengalir secara terus menerus untuk membangkitkan kultur organisasi Badan, guna meningkatkan eksistensi Badan dan mempertahankan keberlanjutan hidup dan fungsi badan itu sendiri.

Keterkaitan antara berbagai perencanaan pembangunan mulai dari tingkat Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1.1.
Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004



Dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJMD ke dalam RKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS Kabupaten Sumedang untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumedang.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam penyusunan Renstra, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPPEDA dan pemangku kepentingan lainnya.

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa "Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD", dan ayat (2) menyatakan bahwa "Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu periode 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Secara umum, dokumen Perubahan Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, BKAD wajib menyusun Perubahan Rencana Strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya. Namun di sisi lain penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah harus memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, di mana pada peraturan tersebut terjadi perubahan nomenklatur, yang semula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini akan berpengaruh pada nama dan batang tubuh Peraturan Bupati terkait Rencana Strategis. Agar Peraturan Bupati terkait Rencana Strategis selaras dan konsisten dengan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, maka Peraturan Bupati yang dibentuk bukan merupakan peraturan perubahan atas peraturan sebelumnya, tetapi merupakan peraturan tentang Rencana Strategis yang mencabut peraturan sebelumnya.

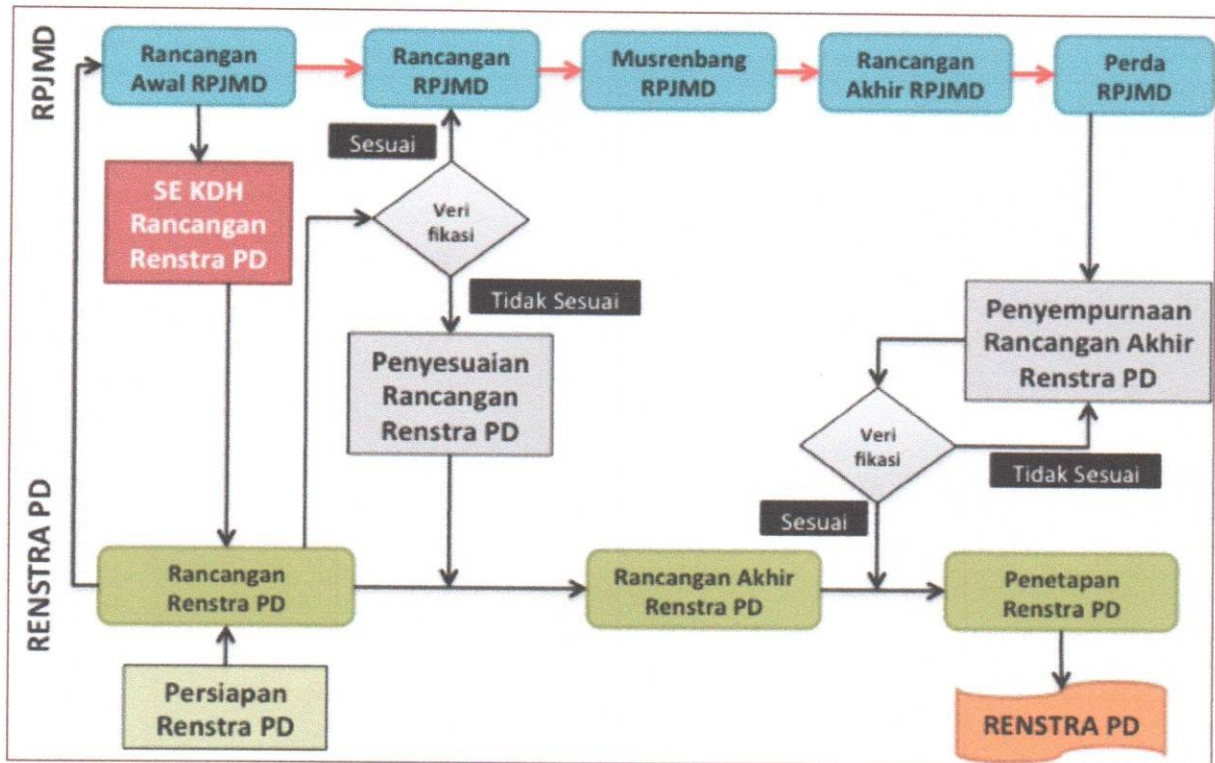
Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rencana awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas Perangkat Dearah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan

Adapun bagan alir penyusunan Renstra BKAD yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra BKAD sampai dengan penetapan Renstra OPD dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut :

Gambar 1.1.2
Proses Penyusunan Renstra BKAD Kabupaten Sumedang
Periode 2018-2023



1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, yang akan menjadi acuan dan panduan pembangunan Kabupaten Sumedang bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

- Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 87);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8 Seri E);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah

- Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018–2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 13);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
 43. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

1. Sebagai arah kebijakan dan acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Sebagai Indikator Kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja BKAD Kabupaten Sumedang 3 (tiga) Tahun kedepan;
2. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Mendorong pemikiran ke depan dan menjelaskan arah yang dikehendaki di masa yang akan datang.
4. Diketuainya peluang-peluang dan ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal serta membuat organisasi tetap terarah.
5. Dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang saling berkaitan, dengan jalan mengkoordinasikan masalah-masalah itu.
6. Dapat dijadikan sebagai alat komunikasi yang paling baik dengan semua pihak.
7. Memperjelas proses perencanaan jangka panjang sehingga implementasi dari suatu rencana akan lebih mudah.
8. Memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas kepada manajerial/pejabat di tingkat bawah dan staf Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang visi dan misi badan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta memberikan arah untuk mencapai tujuan tersebut.
9. Memberikan kejelasan kepada jajaran pejabat/staf di Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman terhadap badan.
10. Memudahkan pejabat/staf Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk membuat keputusan dan tindakan yang bersifat strategis untuk memperkecil kemungkinan gagalnya pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.
11. Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan

Bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi BKAD; kondisi sumber daya yang dimiliki oleh BKAD dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh BKAD.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BKAD
- 2.2 Sumber Daya BKAD
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan BKAD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKAD

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis BKAD Kabupaten Sumedang

Bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BKAD; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BKAD
- 3.2. Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
- 3.3. Telaahan renstra kementerian keuangan dan Renstra BKAD Propinsi Jawa Barat
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah BKAD.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan BKAD.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan dan Indikator Kinerja, kelompok sasaran pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran BKAD lima tahun mendatang.

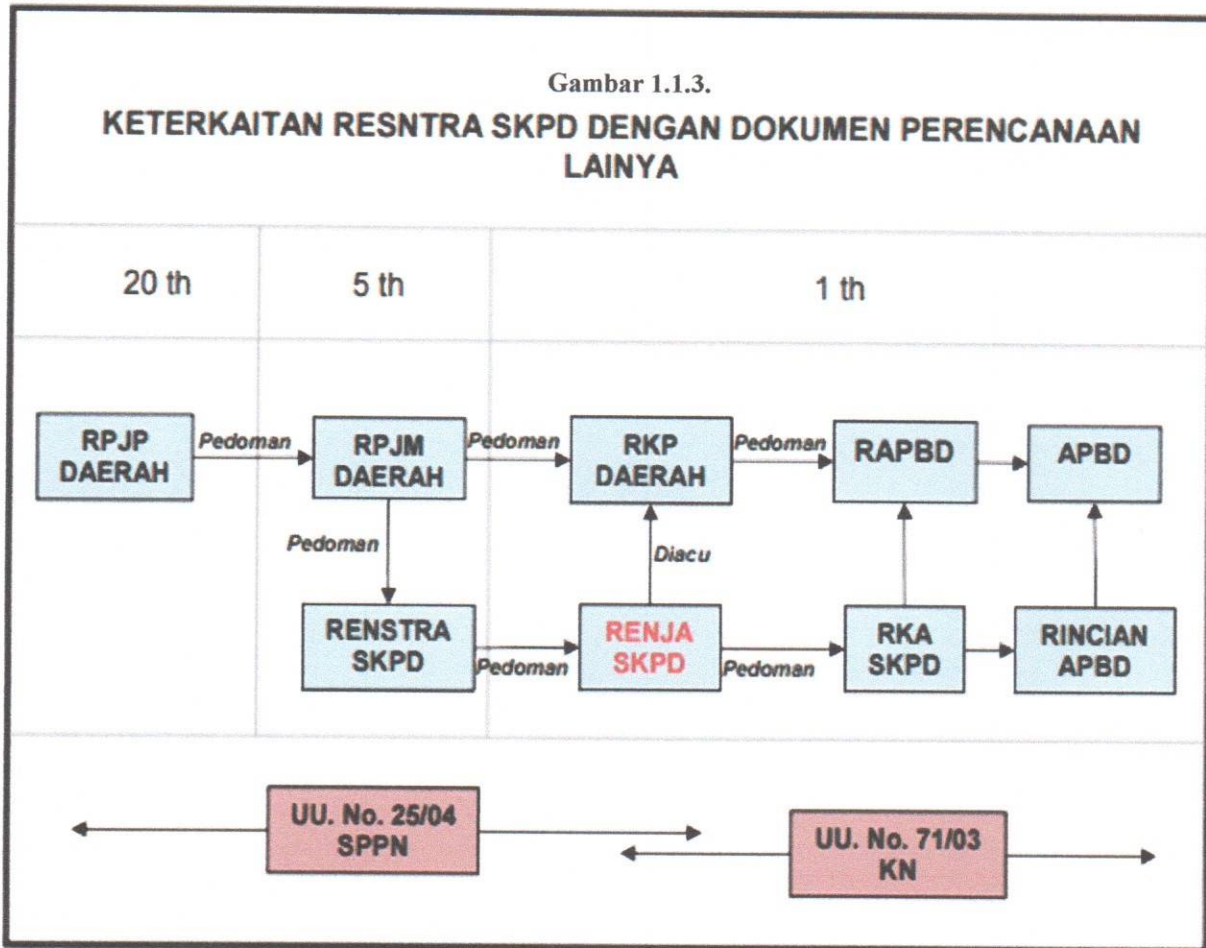
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII PENUTUP

1.5. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra BKAD tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra BKAD akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan BKAD dalam dokumen Renja dan RKA.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKAD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

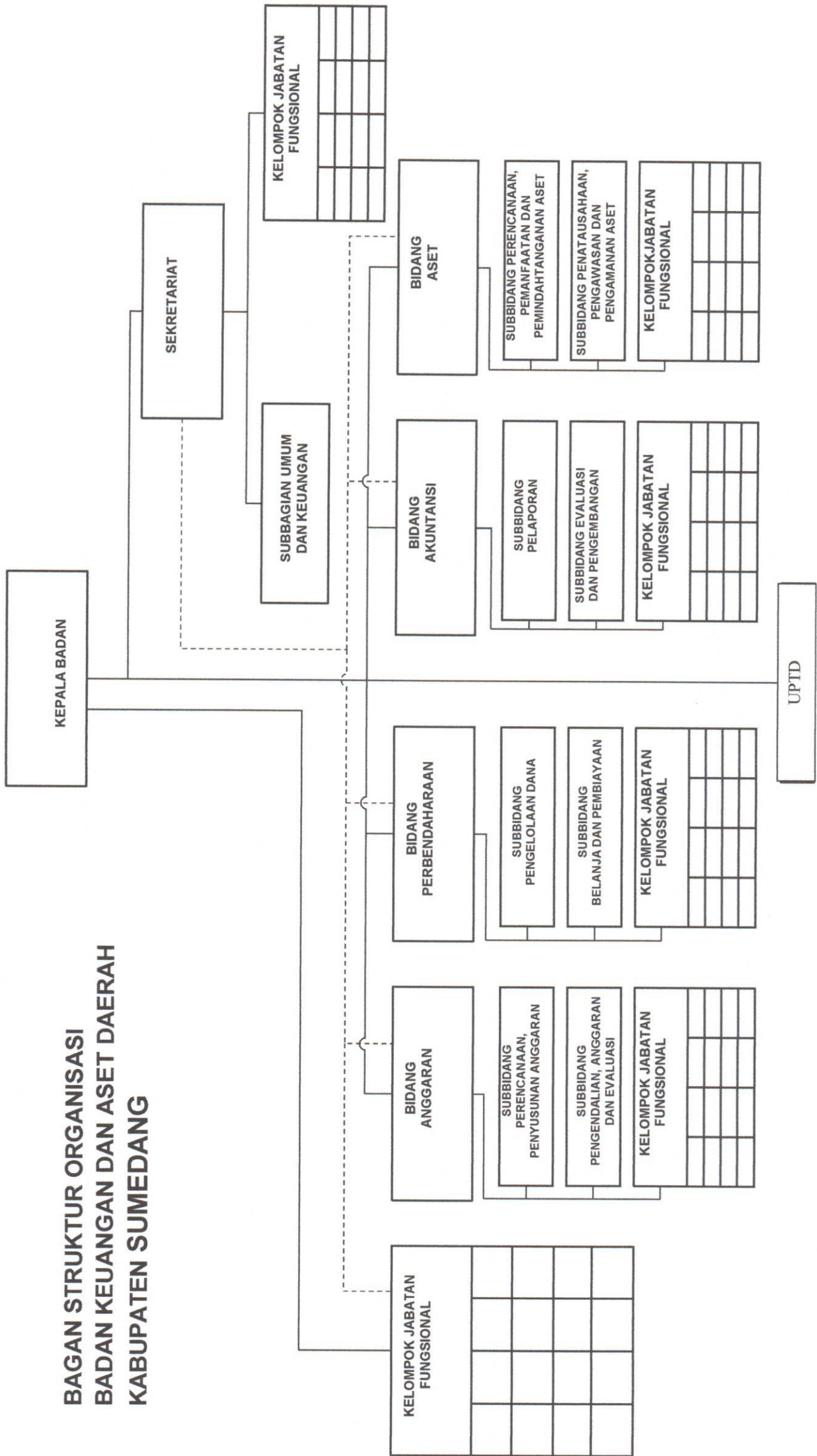
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan;
5. pelaksanaan administrasi badan di bidang keuangan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur srganisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana digambarkan pada bagan berikut ini:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**



Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, menyatakan bahwa Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran;
 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pengelolaan Dana;
 2. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Akuntansi, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pelaporan;
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Aset, membawahkan:
 1. Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset;
 2. Sub Bidang Penatausahaan, Pengawasan dan Pengamanan Aset; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Setiap jabatan struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas umum yang meliputi:

- a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
- c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
- d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
- e. memberikan masukan dan pertimbangan pada atasan sesuai lingkup tugasnya;
- f. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
- g. menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
- h. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
- i. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
- j. menyusun dan mengembangkan inovasi dan kerjasama; dan
- k. melaporkan kegiatan.

Adapun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 194 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada BKAD uraian tugas Jabatan Struktural adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur;
- c. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan fungsi penunjang keuangan;
- d. mengendalikan kegiatan kesekretariatan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. merumuskan perencanaan dan pengendalian operasional dalam bidang keuangan dan aset daerah;
- f. merumuskan sasaran pelaksanaan kegiatan bidang keuangan dan aset daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. mengendalikan penyelesaian permasalahan bidang keuangan dan aset daerah;
- h. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang keuangan dan aset daerah;
- i. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- j. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dibantu oleh:

- a. Sekretaris;
- b. Kepala Bidang Anggaran;
- c. Kepala Bidang Perbendaharaan;
- d. Kepala Bidang Akuntansi;
- e. Kepala Bidang Aset;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan dibidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, keuangan dan rencana kerja Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Badan;
- b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Badan;
- c. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelayanan Badan dan pada lingkup sekretariat Badan;
- d. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Badan;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
- g. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Badan;
- h. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Badan;
- i. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan;
- j. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Badan;
- k. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Badan;
- l. merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan;
- m. merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Badan;
- n. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Badan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh:

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Anggaran adalah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan dan mengendalikan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Anggaran;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Anggaran;
- c. menyelenggarakan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA dan PPAS;
- d. menyelenggarakan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan perubahan KUA dan PPAS;
- e. menyelenggarakan koordinasi penyusunan RKA SKPD dan perubahan RKA SKPD;
- f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan DPA SKPD dan perubahan DPA SKPD;
- g. menyelenggarakan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- h. menyelenggarakan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- i. menyelenggarakan penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- j. menyelenggarakan penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- k. menyelenggarakan penyusunan Peraturan Bupati tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
- l. menyelenggarakan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan;
- m. menyelenggarakan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
- n. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
- o. menyelenggarakan penyediaan anggaran kas;
- p. menyelenggarakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
- q. menyelenggarakan dan mengendalikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Anggaran; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran; dan

- b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan dibidang perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Perbendaharaan;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Perbendaharaan;
- c. mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
- d. mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
- e. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
- f. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana ransfer lainnya;
- g. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- h. mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- j. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- k. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- l. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- m. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- n. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan Surat Pencairan Dana restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan.

- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perbendaharaan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan dibantu oleh:

- a. Sub Bidang Pengelolaan Dana; dan
- b. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan dibidang akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Akuntansi;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Akuntansi;
- c. menyelenggarakan pengoordinasian laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
- d. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan Bagan Akun Standar;
- e. menyelenggarakan pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
- f. menyelenggarakan pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
- g. menyelenggarakan pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten;
- h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- i. menyelenggarakan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
- j. pengoordinasian tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- k. menyelenggarakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- l. menyelenggarakan pengoordinasian evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- m. menyelenggarakan penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- n. mengendalikan penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah kabupaten;
- o. menyelenggarakan penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah kabupaten;

- p. menyelenggarakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- q. menyelenggarakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah kabupaten;
- r. merumuskan pengendalian register pengesahan dan pengendalian keuangan pemerintah daerah kabupaten;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Akuntansi; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh :

- a. Sub Bidang Pelaporan; dan
- b. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan,
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Aset

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan kegiatan di bidang aset.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Aset adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas dilingkup Bidang Aset;
- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur pelayanan Bidang Aset;
- c. melaksanakan penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan;
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengadaan dan distribusi barang milik daerah;
- e. merumuskan status dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah;
- f. meneliti hasil penilaian barang milik daerah untuk penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- g. menyusun kajian/telaahan teknis dan fasilitasi terhadap pemanfaatan barang milik daerah meliputi sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
- h. menyusun kajian/telaahan teknis dan fasilitasi terhadap pemindahtanganan barang milik daerah meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal.
- i. meneliti dokumen kelengkapan administratif/fisik dan fasilitasi pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;

- j. meneliti dokumen kelengkapan administratif/fisik dan fasilitasi pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
- k. merumuskan kebijakan teknis Standar Satuan Harga;
- l. merumuskan kebijakan teknis penatausahaan barang milik daerah;
- m. meneliti hasil pembukuan barang milik daerah;
- n. meneliti dokumen inventarisasi barang milik daerah;
- o. merumuskan laporan barang milik daerah;
- p. melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- q. melaksanakan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
- r. merumuskan kebijakan teknis tentang pengamanan barang milik daerah yang meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum;
- s. melaksanakan pengamanan bukti kepemilikan barang milik daerah yang sah berupa sertifikat dan buku pemilik kendaraan bermotor;
- t. menyelenggarakan fasilitasi dan evaluasi pengelolaan barang milik daerah berupa rumah negara;
- u. memfasilitasi pelaksanaan tuntutan ganti rugi kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan barang milik daerah;
- w. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang aset; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset dibantu oleh:

- a. Subbidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset;
- b. Subbidang Penatausahaan, Pengawasan dan Pengamanan Aset; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 57 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan tabel 2.1, jumlah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang berada di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 18 orang, kelompok umur 46-50 sebanyak 18 orang, kelompok umur 41-45 sebanyak 13 orang, kelompok umur 36-40 sebanyak 7 orang, kelompok

umur 26-30 sebanyak 1 orang, dan kelompok umur 20-25 sebanyak 2 orang.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)						JUMLAH	
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50		>50
1	Sekretariat		1		1	2	6	6	16
2	Bidang Anggaran	1			2	3	2	2	10
3	Bidang Perbendaharaan				2	2	6	5	15
4	Bidang Akuntansi	1			1	4		1	7
5	Bidang Aset				1	2	4	4	11
TOTAL		2	1		7	13	18	18	59

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan tabel. 2.2 pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah yang menempati golongan IV sebanyak 6 orang (10,1%), pegawai yang menempati golongan III sebanyak 40 orang (67,9%), dan pegawai yang menempati golongan II sebanyak 13 orang (22%) orang.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		7	7	2	16
2	Bidang Anggaran			10		10
3	Bidang Perbendaharaan		3	10	2	15
4	Bidang Akuntansi		1	5	1	7
5	Bidang Aset		2	8	1	11
TOTAL			13	40	6	59

2.2.3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan table 2.3 pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumedang yang memiliki tingkat pendidikan S2 sebanyak 18 orang (30,5%), S1 sebanyak 25 orang (42,3%), Diploma sebanyak 4 orang (6,7%), dan lulusan SMA sebanyak 12 orang (20,5%). Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) didominasi oleh pegawai yang berpendidikan S1. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara

umum tingkat pendidikan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sudah memadai.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	Diploma	S1	S2	
1	Sekretariat	6	1	5	4	16
2	Bidang Anggaran		1	5	4	10
3	Bidang Perbendaharaan	3	1	7	4	15
4	Bidang Akuntansi		1	4	2	7
5	Bidang Aset	3		4	4	11
TOTAL		12	4	25	18	59

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 15 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi, sehingga pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 15 orang sebagaimana penjelasan dalam tabel 2.4..

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	9
4	Fungsional tertentu	4
5	Pelaksana	40
	Jumlah	59

2.2.5. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumedang berjenis kelamin perempuan berjumlah 29 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 28 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	6	10	16
2	Bidang Anggaran	5	5	10
3	Bidang Perbendaharaan	9	6	15
4	Bidang Akuntansi	5	2	7
5	Bidang Aset	4	7	11
TOTAL		29	30	59

2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka dapat disimpulkan bahwa seimbang jumlah perempuan dan laki-laki dengan jumlah 37 orang (50%) disbanding jumlah laki-laki sebanyak 37 orang (50%) sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	1	-	
2	Eselon III	5	-	
3	Eselon IV	6	3	
4	Fungsional Tertentu	1	3	
5	Pelaksana (Staf)	16	24	
	Jumlah	29	30	

2.2.7. Sarana dan Prasarana BKAD

Disamping Sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat Sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) khususnya dalam fungsi teknis.

Saat ini, kondisi sarana prasarana di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum Aset khususnya asset tetap maupun asset

intangible atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7
Jumlah Aset/Modal
Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2021

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan roda 4	19	19	-	
2.	Kendaraan roda 2	60	56	3	
3.	Peralatan kantor :				
	- Kartu Inventaris Barang (KIB B)	746	746		
	- Aset Tetap Lainnya (KIB E)	-	-		
	- Aset Tidak Berwujud - Barang Rusak Berat	-	-		
4.	Buku Perpustakaan	-	-		

Berdasarkan Tabel 2.7 di atas menunjukkan bahwa data sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumedang masih belum memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya adalah sarana dan prasarana dalam mendukung fungsi utama serta fasilitas perkantoran.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Tingkat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah periode sebelumnya (2014-2018) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun						
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018		
1	Opini BPK				WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja				20%	22.5%	25%	27.5%	30%	18.78%	23.68%	18.53%	19.24%	13%	93,90 %	105,40 %	74,12 %	69,96 %	43,33 %		

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang

No	Uraian	Anggaran Tahun						Realisasi Anggaran Pada Tahun						Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi		
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	14.695.652.830	7.520.120.195	5.543.312.450	5.500.666.283	7.824.906.050	12.472.136.394	6.916.115.966	5.347.480.640	5.128.375.687	7.384.374.622	17%	14%		
2	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten	1.366.171.000	1.237.304.800	1.313.820.510	904.142.000	710.817.600	1.168.482.145	1.016.791.158	1.269.914.726	781.134.697	668.408.900	18%	15%		
3	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			50.000.000											

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Untuk mengetahui bagaimana posisi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sumedang, maka perlu dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi.

Lingkungan internal mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dari suatu organisasi sedangkan lingkungan eksternal mencakup peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threat*) yang dihadapi suatu organisasi. Pengertian dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman adalah sebagai berikut :

1. *Kekuatan* merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.
2. *Kelemahan* merupakan kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh suatu organisasi.
3. *Peluang* merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan terbuka untuk dimanfaatkan.
4. *Ancaman* merupakan kondisi dan situasi yang dapat membahayakan bagi kelangsungan kegiatan organisasi.

Analisis Lingkungan Internal

a. *Kekuatan (Strengths)*

1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;
Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 194 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai;
Adanya Sarana dan Prasarana yang memadai dan nyaman sangat menunjang kelancaran pekerjaan.
3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai;
Dengan jumlah kekuatan personil sebanyak 59 orang telah dirasakan cukup untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi BKAD sebagai pengelola keuangan dan aset daerah.
4. Disiplin dan tanggungjawab sudah baik;
Kedisiplinan dan tanggungjawab pegawai merupakan modal dasar yang potensial dalam menjalankan tupoksi organisasi guna mencapai

tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama seluruh stakeholder.

5. Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional organisasi BKAD.

Tersedianya Dokumen Standar Operasional Prosedur sebagai panduan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kelemahan (weakness)

1. Kualitas SDM masih belum memadai;

Meskipun dari segi jumlah sudah memadai, namun dari segi kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal dan profesional.

2. Belum optimalnya fungsi pengelolaan aset daerah;

Fungsi pengelolaan aset daerah dirasakan masih perlu diperkuat dengan pembentukan peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai pengelolaan barang milik daerah.

3. Belum Optimalnya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem Aplikasi SIPD masih belum optimal dikarenakan menu Penatausahaan, pelaporan dan asset masih belum tersedia di Aplikasi SIPD. Sehingga masih menggunakan aplikasi pendamping untuk memfasilitasi menu yang tidak tersedia di SIPD.

Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan hal yang krusial, sehingga peraturan perundang-undangannya sangat memadai dan dinamis lengkap dengan peraturan perubahannya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan dan aset daerah;

Peraihan Opini BPK merupakan usaha dan perjuangan bersama seluruh SKPD sebagai perangkat daerah, maka dari itu adanya komitmen bersama adalah sangat esensial dan mendasar.

2. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern.

Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam manajemen perkantoran modern dalam menjalankan aktivitasnya, seperti mengolah data-data transaksi pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga menjadi informasi yang lebih berguna. (SIPD dan SiPasti)

b. Ancaman/Tantangan (Threats)

1. Koordinasi antar dinas mitra BKAD belum memadai;

Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian indikator ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan khususnya. Keterlambatan penyampaian berkas SPP/SPM, lap. Pertanggungjawaban dll.

2. Belum optimalnya antara sistem informasi perangkat daerah (SIPD) pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Kondisi tersebut menjadi kendala dalam mengevaluasi apakah implementasi sudah sesuai dengan perencanaan atau belum.

3. Adanya kekhawatiran dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah; Kekhawatiran ini harus dilindungi dengan payung hukum yang mengatur setiap pengelolaan transaksi dalam penatausahaan keuangan daerah sampai kepada proses pelaporannya.

4. Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah;

Kondisi tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan.

5. Adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset yang tidak dapat diprediksi.

Hal ini menjadi kendala ketika anggaran sudah ditetapkan dengan peruntukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu, tetapi kemudian harus mengalami perubahan atau penghapusan mata anggaran karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BKAD

3.1. Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKAD

Sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sumedang yang menyelenggarakan otonomi daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah tentu saja akan dihadapkan pada berbagai tantangan baik internal maupun eksternal yang cukup berat.

Secara internal, sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia, regulasi/ produk hukum serta sarana dan prasarana yang dimiliki akan sangat berpengaruh terhadap jalannya organisasi, berikut ini sekilas gambaran berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
Masih rendahnya kualitas penganggaran di lingkungan Pemerintah Daerah	Masih rendahnya kualitas dokumen penganggaran	Masih rendahnya pemahaman penganggaran yang berkualitas pada organisasi perangkat daerah	Masih rendahnya pemahaman penganggaran yang berkualitas
Masih adanya kendala efektifitas implementasi aplikasi sistem informasi keuangan dan anggaran	Sistem aplikasi informasi keuangan masih belum maksimal	Sistem penatausahaan dengan penganggaran masih belum terintegrasi	Sistem penatausahaan dengan penganggaran masih menggunakan 2 aplikasi
Ketidaksesuaian penentuan anggaran dengan analisis standar belanja	Penganggaran sebagian belum mengacu pada ASB	Analisis Standar Belanja sebagian belum diterapkan	Masih adanya sebagian pengalokasian anggaran belum mengacu pada ASB
Bendahara Pengeluaran masih belum tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban	Penyampaian laporan pertanggungjawaban perangkat daerah sebagian masih belum tepat waktu	Penyusunan pertanggungjawaban perangkat daerah sebagian masih belum tepat waktu	Penyusunan pertanggungjawaban perangkat daerah sebagian masih belum tepat waktu
Terbatasnya penyimpanan arsip dokumen	Tempat penyimpanan arsip dokumen	Masih terdapat sebagian arsip pengelolaan	Banyak arsip pengelolaan keuangan yang

pengelolaan keuangan	pengelolaan keuangan masih dianggap kurang	keuangan secara terpisah	seharusnya disimpan pada satu tempat
Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian	Sebagian adanya keterlambatan dalam proses kenaikan pangkat/golongan	Sistem informasi kepegawaian dengan penggajian belum terintegrasi	Sistem informasi kepegawaian dengan penggajian belum terintegrasi
Laporan Keuangan SKPD belum tepat waktu	Keterlambatan penyampaian laporan keuangan PD	Adanya tumpang tindih pekerjaan disebabkan setiap skpd hanya mengandalkan satu orang pegawai	Sumber daya manusia pengelola laporan keuangan masih terbatas
Status aset sebagian masih ada yang belum jelas dan memiliki ketetapan hukum	Status kepemilikan aset sebagian masih ada yang belum jelas	Harus ada pendataan terkait kepemilikan aset	Harus ada pendataan terkait kepemilikan aset
Laporan Aset SKPD belum tepat waktu	Keterlambatan penyampaian laporan aset perangkat daerah	Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam pencatatan aset	Masih kurangnya pemahaman pengurus barang dalam pencatatan aset di perangkat daerah
Masih belum terintegrasikannya sistem informasi aset dengan akuntansi	Rekon pencatatan aset dan pencatatan akuntansi masih memerlukan waktu	Masih belum terintegrasinya sistem informasi aset dan akuntansi di perangkat daerah	Masih belum terintegrasinya sistem informasi aset dan akuntansi

No	Aspek	Permasalahan
1.	Permasalahan dalam Bidang Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas penganggaran di lingkungan Pemerintah Daerah; 2. Masih adanya kendala efektifitas implementasi aplikasi sistem informasi keuangan dan anggaran; 3. Ketidaksesuaian penentuan anggaran dengan analisis standar belanja.
2.	Permasalahan dalam Bidang Perbendaharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya ketidakkonsistenan antara rencana anggaran kas dengan pelaksanaannya; 2. Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran oleh OPD; 3. Bendahara Pengeluaran masih belum tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban; 4. Terbatasnya penyimpanan arsip dokumen pengelolaan anggaran; 5. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian;
3.	Permasalahan dalam Bidang Akuntansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya kendala dukungan data yang tidak sinkron pada saat rekonsiliasi; 2. Masih adanya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari OPD; 3. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi akuntansi dengan aset.
4.	Permasalahan dalam Pengelolaan Aset	<ol style="list-style-type: none"> 1. Status aset masih ada yang belum jelas dan memiliki ketetapan hukum; 2. Masih kurangnya pemahaman pengurus barang dalam pencatatan aset di OPD; 3. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi aset dengan akuntansi.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023, Visi Kabupaten Sumedang adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023*** dengan penjelasan Visi sebagai berikut:

SEJAHTERA Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

AGAMIS Sikap dan perilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai- nilai agama yang diyakininya. Ditandai banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar

penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya lembaga sosial keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

MAJU Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada di sekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antar pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

PROFESIONAL *Good Governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *Good Governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan.

KREATIF masyarakat yang memiliki dorongan kerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian *trickel-down effect* itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu perlu disertai dengan kesiapan tenaga-tenaga terampil dalam meningkatkan daya

saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai mainstream diamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan.
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.
4. Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Peran Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang khususnya Misi ke 4 yaitu **“Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan Masyarakat”** diawali dengan penyusunan program dan perencanaan penganggaran yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun anggaran. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa penjabaran RPJMD yang didalamnya memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ke dalam RKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Sumedang untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumedang.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga pengelolaan keuangan dan aset dapat dilakukan secara efektif, akuntabel dan transparan.

Adapun Tujuan, Sasaran, Urusan dan Program sesuai masing-masing Misi RPJMD adalah sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel. 3.2.
Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	URUSAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Keberhasilan suatu organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk melakukan adaptasi dengan perubahan lingkungan baik secara internal maupun eksternal. Untuk itu perlu ada pemetaan terhadap permasalahan dari berbagai aspek.

Memperhatikan sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 diantaranya adalah terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien serta meningkatnya kualitas SDM Aparatur pemerintah. Dalam rangka ikut mensukseskan tercapainya sasaran tersebut, sebagai badan yang menangani masalah pengelolaan keuangan dan aset daerah tentu saja tidak terlepas dari permasalahan mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Beberapa permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan badan dapat dilihat dari aspek-aspek berikut:

1. Aspek Perencanaan

- a. Proses penetapan APBD telah dilaksanakan tepat waktu, namun demikian secara kualitas APBD masih perlu ditingkatkan diantaranya perbaikan struktur APBD untuk belanja publik (modal) lebih ditingkatkan lagi.
- b. Belum adanya indikator yang jelas dan baku untuk mengukur efektifitas pengelolaan anggaran dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terutama terkait dengan korelasi antara tugas dan fungsi dengan program/kegiatan yang dilaksanakan.
- c. Perlunya sinkronisasi dan penyesuaian terhadap struktur program/kegiatan dan anggaran yang lebih berorientasi pada efektifitas, efisiensi dan capaian kinerja SKPD.

2. Aspek Pengorganisasian

- a. Masih terbatasnya personil yang menguasai proses pengadaan barang/ jasa, terutama yang bersertifikat.
- b. Ditinjau dari aspek pendidikan, kemampuan dan keterampilan pegawai yang tersedia belum berperan secara optimal sesuai kompetensi yang dimiliki.

3. Aspek Pelaksanaan

- a. Pengelolaan Barang Milik Daerah akan mengalami tantangan terutama dalam tertib administrasi berkaitan dengan struktur organisasi baru.
- b. Tantangan untuk mempertahankan Opini WTP atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK yang telah diraih dari tahun 2015 s.d. 2021.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra BKAD dengan capaian Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat dan Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di tingkat pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Propinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal di nasional bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian BKAD dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target propinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2018-2023 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Sumedang dengan Renstra BPKAD Provinsi dan Kementerian Keuangan sebagaimana tabel dibawah ini:

TABEL 3.3
PERBANDINGAN SASARAN
RENSTRA KEMENTERIAN TERKAIT SERTA
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT DENGAN
KABUPATEN SUMEDANG

No	Indikator Kinerja	Sasaran pada Renstra BKAD Kabupaten Sumedang	Sasaran Renstra BKAD Provinsi Jawa Barat	Sasaran pada Renstra Kementerian Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas
2	Penetapan APBD Tepat Waktu			

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya diturunkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah ditetapkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif serta bersifat wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program berdasarkan tujuan pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Adapun pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek Lingkungan Hidup, Sosial, dan Ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan Lingkungan Hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Kemudian dengan adanya perubahan kebijakan yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan menjadi Undang-Undang. Kemudian dikeluarkannya

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, menyebabkan perlu adanya perubahan perencanaan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Mencermati permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan vsi, misi dan program Kepala Daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian keuangan dan aset daerah termasuk juga penyelesaian keuangan dan aset desa, isu-isu strategis/ permasalahan yang dimungkinkan berkembang dalam menjalankan tugas dan fungsi badan selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

TABEL 3.4
ISU STRATEGIS DALAM BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

No	Aspek	Permasalahan	Isu- isu strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas penganggaran di lingkungan Pemerintah Daerah; 2. Masih adanya kendala efektifitas implementasi aplikasi sistem informasi keuangan dan anggaran; 3. Ketidaksesuaian penentuan anggaran dengan analisis standar belanja. 	Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Anggaran
2.	Permasalahan dalam Bidang Perbendaharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya ketidakkonsistenan antara rencana anggaran kas dengan pelaksanaannya; 2. Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran oleh OPD; 3. Bendahara Pengeluaran masih belum tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban; 4. Terbatasnya penyimpanan arsip dokumen pengelolaan anggaran; 5. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian; 	Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Pegajuan Pembayaran
3.	Permasalahan dalam Bidang Akuntansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya kendala dukungan data yang tidak sinkron pada saat rekonsiliasi; 2. Masih adanya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari 	Masih Rendahnya Kualitas Pelaporan Keuangan OPD

		OPD; 3. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi akuntansi dengan aset.	
4.	Permasalahan dalam Bidang Aset	1. Status aset masih ada yang belum jelas dan memiliki ketetapan hukum; 2. Masih kurangnya pemahaman pengurus barang dalam pencatatan aset di OPD; 3. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi aset dengan akuntansi.	Masih Rendahnya Kualitas Penatausahaan Aset Daerah

Dari tabel 3.5 di atas, dapat ditentukan bahwa isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan keuangan dan aset daerah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas dokumen anggaran;
2. Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran;
3. Masih rendahnya kualitas pelaporan keuangan OPD;
4. Masih rendahnya kualitas penatausahaan aset daerah

Dari keempat isu-isu strategis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan isu strategis daerah terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah **Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.**

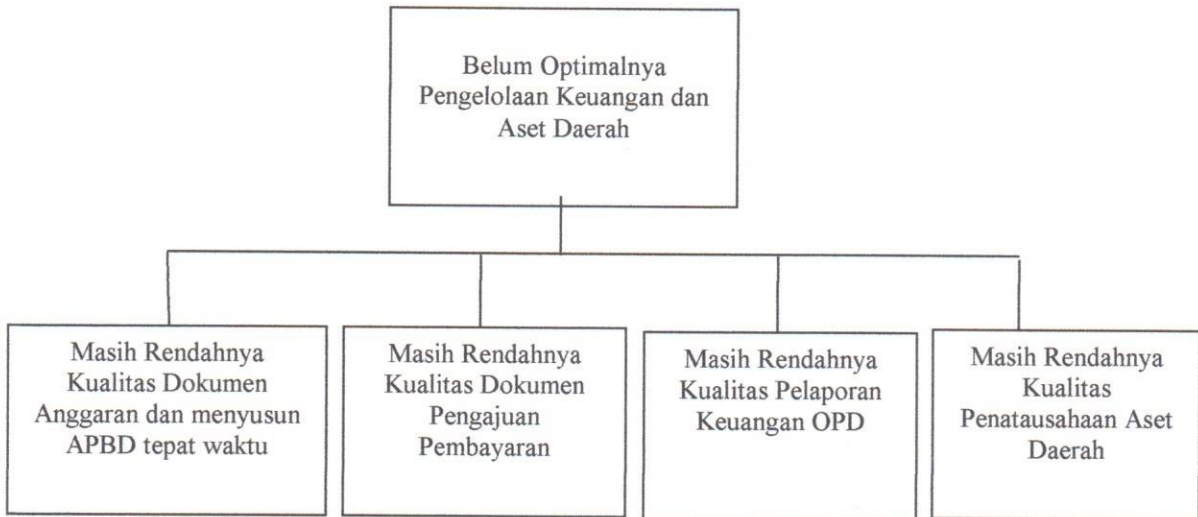
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD Kabupaten Sumedang

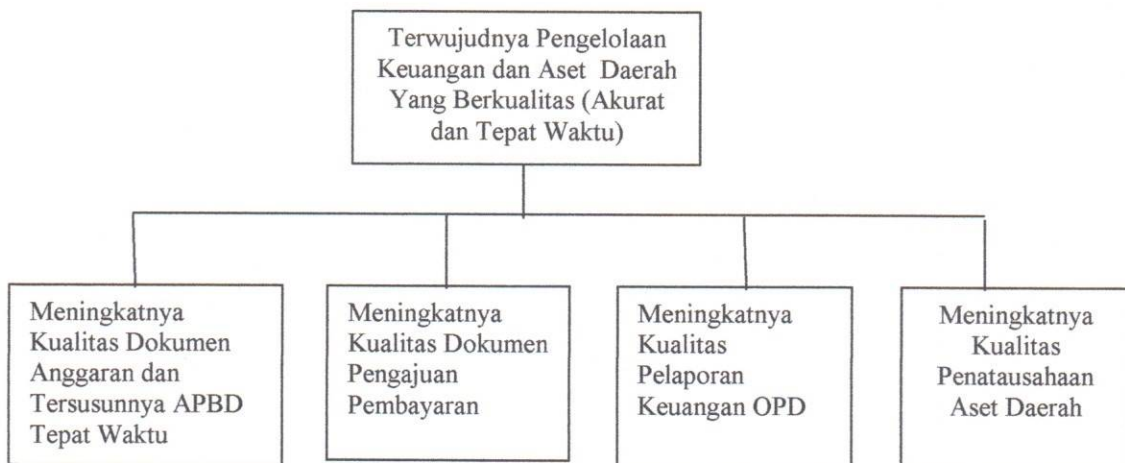
Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, BKAD Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Tujuan dari BKAD adalah :

“MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN”

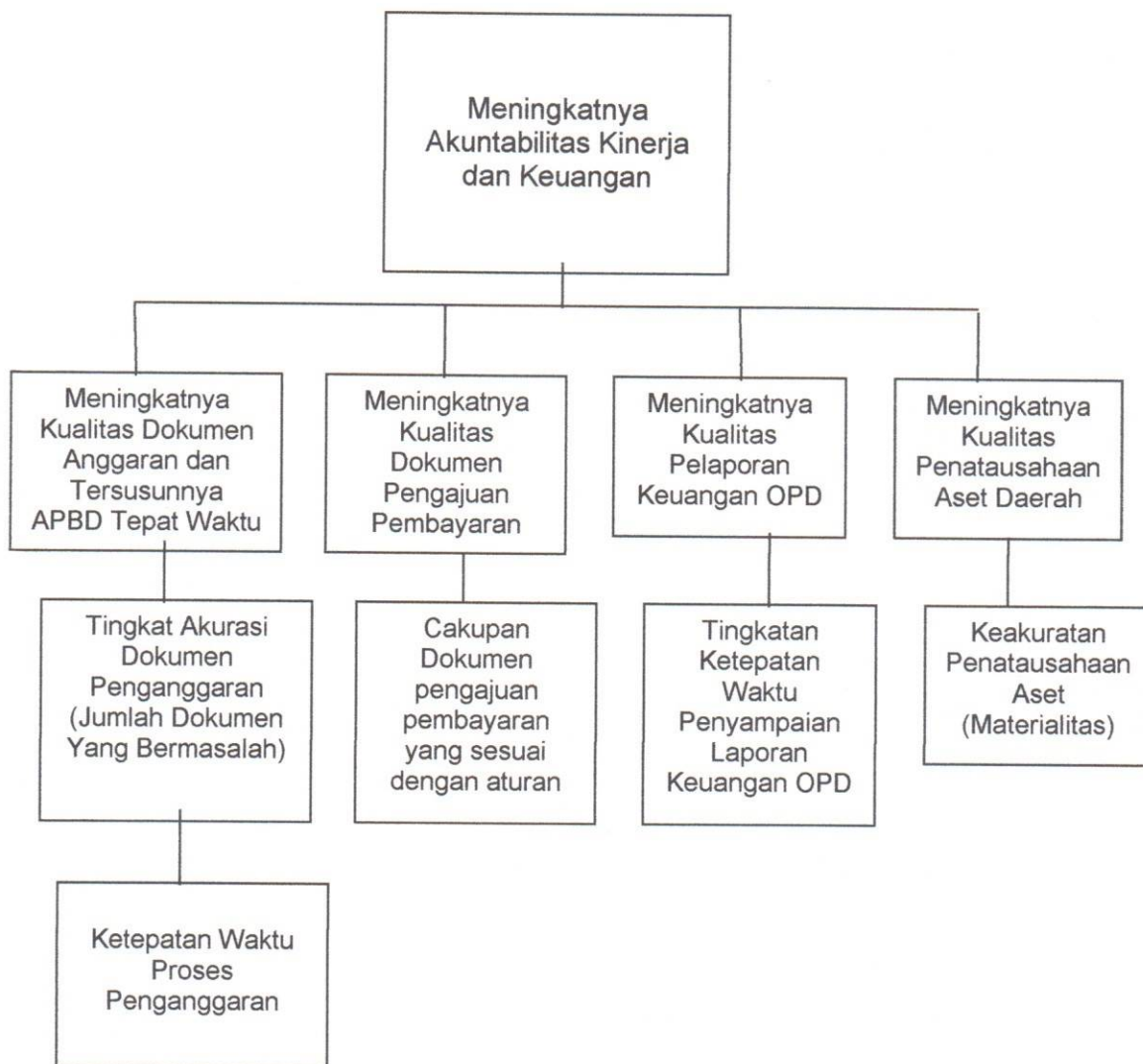
4.1.1 Analisa Pohon Masalah



4.1.2 Analisa Pohon Tujuan



4.1.3 Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Formulasi	Sumber Data
					2019	2020	2021	2022	2023		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Hasil Opini BPK (Opini yang didapat dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya)	Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan yang di rilis oleh BPK
			Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat waktu/ tidak tepat waktu (Penetapan APBD tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD)	Perda APBD	

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	C	B	B	BB	BB	A	Total nilai aspek yang dievaluasi (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja) (Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015). (penilaian yang didapat dari hasil pemeriksaan evaluasi tahun sebelumnya)	Laporan penilaian SAKIP Perangkat Daerah yang dirilis oleh Inspektorat
			Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	22	23	25	28	30	33	Jumlah nilai komponen pengungkit (manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik)	Laporan penilaian indeks pembangunan zona integritas perangkat daerah yang dirilis oleh Inspektorat (Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019)

4.2. Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan Tujuan yang sudah ditetapkan dalam renstra BKAD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, BKAD Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari BKAD adalah:

Tabel 4.2
Penetapan Indikator Utama

No	Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi/ Penjelasan	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	Hasil opini BPK (opini yang didapat dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya)	Laporan keuangan yang dirilis oleh BPK
		Penetapan APBD Tepat Waktu	Status	Tepat waktu/ tidak tepat waktu (penetapan APBD tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD)	Perda APBD

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan BKAD

5.1.1. Strategi:

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparaturnya maupun masyarakat. Oleh karena itu, penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Untuk memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi serta membantu perumusan strategi secara lebih tepat dan terarah, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Manfaat SWOT bagi perumusan strategi dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut:

Tabel 5.1. Matriks Analisis SWOT

		EKSTERNAL	
		PELUANG	ANCAMAN/TANTANGAN
I N T E R N A L	K E K U A T A N	Strategi Kd I : <i>Memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang</i>	Strategi Kd II : Menggunakan kekuatan untuk menghilangkan ancaman
	K E L E M A H A N	Strategi Kd III : Menghilangkan kelemahan untuk merebut peluang	Strategi Kd IV : Menghilangkan kelemahan untuk mengatasi ancaman

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan Strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Untuk itu, perumusan strategi pada Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (*kekuatan/strengths*, *kelemahan/weaknesses*, *peluang/opportunities*, dan *tantangan/threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

TABEL 5.2
ANALISA SWOT
ATAS LINGKUNGAN STRATEGIS INTERNAL DAN EKSTERNAL

Faktor Eksternal	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah; 2. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan dan aset daerah; 3. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern. 	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar Dinas terkait belum memadai; 2. Belum optimalnya integrasi antara system informasi perencanaan dengan pengelolaan keuangan dan aset; 3. Adanya kekhawatiran dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah; 4. Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah; 5. Adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset yang tidak diprediksi. 	
Faktor Internal	<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas; 2. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai; 3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai; 4. Disiplin dan Tanggungjawab sudah baik; 5. Sudah lengkapnya 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah yang Lebih Baik. 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Koordinasi antar OPD Terkait Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan; 2. Peningkatan Kualitas dan Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

SOP untuk mendukung operasional organisasi BKAD.		
Kelemahan (W): 1. Kualitas SDM masih belum memadai; 2. Belum Optimalnya Fungsi Pengelolaan Aset Daerah; 3. Belum Terintegrasinya Sistem Informasi antara Pengelolaan Keuangan dan Aset.	Alternatif Strategi (W-O): 1. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Keuangan dan Aset Daerah.	Alternatif Strategi (W-T): 1. Perlu Adanya Evaluasi dan Penataan Ulang Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah; 2. Peningkatan Kualitas SDM Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan Program-program Pelatihan dan Sertifikasi.

Penentuan strategi- strategi sebagaimana diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah terutama dalam rangka terlaksanannya pengelolaan keuangan dengan baik dan pendayagunaan aset daerah secara optimal. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka BKAD Kabupaten Sumedang menetapkan strategi di antaranya :

1. peningkatan pelaporan keuangan aset daerah yang lebih baik;
2. peningkatan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan;
3. peningkatan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. penguatan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah;
5. perlu adanya evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah;
6. peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program- program pelatihan dan sertifikasi.

5.1.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh BKAD Kabupaten Sumedang adalah:

1. meningkatnya kualitas pelaporan keuangan dan aset daerah;
2. meningkatkan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan;
3. meningkatkan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah;

5. melakukan evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah;
6. meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program- program pelatihan dan sertifikasi.

Penjelasan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BKAD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas dokumen anggaran daerah dan menyusun APBD tepat waktu	Peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi.	Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi.
		Peningkatan sinergitas perencanaan dan penyusunan anggaran	Meningkatkan perencanaan dan penyusunan anggaran
	Meningkatnya serapan belanja daerah	Penguatan pengelola kelembagaan keuangan dan aset daerah.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah.
Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan	Peningkatan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan.	Meningkatkan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas penatausahaan aset daerah	Keakuratan penatausahaan aset (Materialitas).	<p>Perlu adanya evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah.</p> <p>Peningkatan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.</p>	<p>Melakukan evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah.</p> <p>Meningkatkan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.</p>
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	<p>Nilai SAKIP</p> <p>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</p>	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Tabel 5.4

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
BKAD Kab. Sumedang Tahun 2018-2023

Visi	: Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI)		
Misi	: Menata Birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan Masyarakat		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
ARAH KEBIJAKAN			
Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Peningkatan pelaporan keuangan dan aset daerah yang lebih baik.	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan dan aset daerah.
		Peningkatan kualitas koordinasi antar opd terkait pengelolaan keuangan.	Meningkatkan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan.
		Peningkatan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.	Meningkatkan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.
		Penguatan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah.
		Perlu adanya evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah.	Melakukan evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah.
		Peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi	Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dan program-program pelatihan dan sertifikasi.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan Kabupaten Sumedang serta tercapainya Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi badan, maka ditetapkan rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas tahun 2018-2023.

Program dan Kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

6.1. Rencana Program Badan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

a. Belanja Program pada setiap SKPD:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Tujuan dari program-program diatas adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas pelayanan sebagai penunjang kegiatan urusan SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal Badan.

b. Belanja Urusan SKPD:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

6.2. Rencana Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Dua Tahun Ke Depan

Dari Program diatas serta sesuai dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah ditetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD

- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan

V. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pengadaan Mebel
- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

VII. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

VIII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Mebel
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- e. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

I. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
- e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
- f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
- k. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
- l. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
- m. Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

II. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
- b. Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- c. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya
- d. Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
- f. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- g. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota

III. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
- b. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
- c. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
- d. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- e. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- f. Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- g. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
- h. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- i. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
- j. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
- k. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten /Kota
- l. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
- m. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah

IV. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
- b. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- c. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- d. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

V. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

- a. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan

C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

I. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Penyusunan Standar Harga
- b. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- d. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- e. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- f. Inventarisasi Barang Milik Daerah
- g. Pengamanan Barang Milik Daerah
- h. Penilaian Barang Milik Daerah
- i. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- j. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- k. Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- l. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- m. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 6.1.a (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2020
(Sebelum Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program (Outcome) dan kegiatan	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target		Target Kinerja Program dan Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Tahun 2019	Realisasi	Tahun 2020		
TAHUN 2019									Rp			
			NON URUSAN (WAJIB SKPD)								Nomenklatur SOTK Lama	
Meningkatnya Kualitas Kinerja dengan Prinsip tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah		Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100%	100%	Rp 4.230.582.250	Rp 4.083.468.711			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Bulan	12	12	699.380.000	665.375.754,00			BPKAD
			Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	12	1.370.822.250	1.345.900.000,00			BPKAD
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	19	19	25.000.000	24.684.000,00			BPKAD
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi	Kali	75	75	1.011.500.000	1.010.756.857,04			BPKAD
			Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Paket	1	1	159.520.000	124.460.000,00			BPKAD
			Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Tenaga Operasional pengamanan	Paket	1	1	166.850.000	163.550.000,00			BPKAD
			Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa Kebersihan	Paket	1	1	265.850.000	260.550.000,00			BPKAD
			Pelayanan Ketatausahaan Se-Kabupaten Sumedang	Jumlah Sistem Informasi Perangkat Daerah	Paket	1	1	417.775.000	414.292.100,00			BPKAD
			Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Profil BPKAD	Dokumen	1	1	73.885.000	24.300.000,00			BPKAD
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	1	1	50.000.000	50.000.000,00			BPKAD
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100%	100%	Rp 2.696.869.400	Rp 2.569.258.553			
			Pengadaan Perengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Gedung kantor yang dibangun	Paket	1	1	136.745.000	134.699.000,00			BPKAD
			Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jenis	1	1	1.513.275.000	1.469.580.650,00			BPKAD
			Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Halaman Gedung kantor yang Dihata	Paket	1	1	559.600.000	483.478.900,00			BPKAD
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	Paket	1	1	24.750.000	24.250.000,00			BPKAD
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	Paket	1	1	266.500.000	282.206.003,00			BPKAD
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Perengkapan dan Peralatan Kantor/ Gedung Kantor yang dipelihara	Jenis	3	3	75.999.400	75.900.000,00			BPKAD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan yang dipelihara	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Target	Tahun 2019		Tahun 2020			
								Rp	Realisasi	Rp			Realisasi
			Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	unit	1	1	200.000.000	99.150.000,00			BPKAD	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	%	100%	100%	Rp 218.500.000	Rp 213.865.000				
			Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah pakaian Dinas beserta Perengkapannya	stel	100	100	56.300.000	56.050.000,00				BPKAD
			Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	stel	100	100	66.300.000	64.000.000,00				BPKAD
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	stel	100	100	95.900.000	93.815.000,00				BPKAD
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	%	100%	100%	Rp 351.400.000	Rp 224.150.000				
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	Paket	1	1	351.400.000	224.150.000,00				BPKAD
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja	%	100%	100%	Rp 230.000.000	Rp 225.860.000				
				Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah									
				Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD	Dokumen	6	6	155.000.000	155.000.000,00				BPKAD
			Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	75.000.000	70.860.000,00				BPKAD
			Program Peningkatan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD	%	100%	100%	Rp 206.365.000	Rp 178.818.521				
				Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD									
			Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	6	6	206.365.000	178.818.521,00				BPKAD
			Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	%	100%	100%	Rp 25.000.000	Rp 50.000.000				
			Pengelolaan Data kepegawaian	Jumlah Data kepegawaian yang dikelola	Dokumen	4	4	25.000.000	25.000.000				BPKAD
			URUSAN KEUANGAN										
				I. Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	%	100	100%	Rp 850.245.300	Rp 709.514.343				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program (Outcome) dan kegiatan	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Target	Tahun 2019		Tahun 2020				
								Rp	Realisasi	Rp			Realisasi	
Meningkatkan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2. Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran;	%	90	92	Rp	655.333.950	Rp	602.351.900			
				3. Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan aturan;	%	90	91	Rp	1.003.215.800	Rp	852.903.770			
				4. Tingkat Ketepatan Waktu Penyempaian LKOPD dan LKPD;	%	80	85	Rp	725.693.950	Rp	689.968.817			
				5. Keakuratan Penatausahaan Aset (Materi/altas);	%	87	87	Rp	1.197.390.200	Rp	1.138.144.846			
				Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan APBD	Dokumen	3	3		92.391.000		91.999.043,00			BPKAD
			Verifikasi Rancangan DPPA SKPD/PPKD Sesuai Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan APBD	Dokumen	2	2	2	41.333.750	41.333.750			BPKAD		
			Sinergitas Perencanaan Penyusunan Anggaran	Jumlah Tim Verifikator	Orang	100	100		403.919.250	368.098.465,00			BPKAD	
			Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Pifon Anggaran Sementara APBD	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Murni	Dokumen	4	4		281.824.000	266.793.225,00			BPKAD	
			Asistensi IKKA SKPD/PPKD APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	110	110		126.698.400	110.098.150,00			BPKAD	
			Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	Dokumen	1	1		206.477.750	190.979.075,00			BPKAD	
			Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen APBD Murni	Dokumen	4	4		401.445.000	343.909.919,00			BPKAD	
			Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	4	4		165.800.000	136.925.000,00			BPKAD	
			Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Pifon Anggaran Sementara Perubahan APBD	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PPAS) Perubahan	Dokumen	2	2		180.963.100	145.223.100,00			BPKAD	
			Asistensi IKKA SKPD/PPKD Perubahan APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	SKPD	56	56		21.675.000	20.675.000,00			BPKAD	
			Verifikasi DPPA SKPD/PPKD APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	SKPD	61	56		146.860.550	144.728.050,00			BPKAD	
			Penyusunan kebijakan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan Daerah	Sistem	3	3		633.318.700	336.484.979,00			BPKAD	
			Penyebutan Informasi Peraturan Daerah Tentang APBD	Buku Saku Murni dan Perubahan	Dokumen	1	1		225.975.000	210.600.700,00			BPKAD	
			Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Sosialisasi	Orang	100	100		276.406.800	255.314.800,00			BPKAD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program (Outcome) dan kegiatan	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Target	Tahun 2019		Tahun 2020				
								Rp	Realisasi	Rp			Realisasi	
			Peningkatan Kapasitas TAPD	Jumlah TAPD	Dokumen	1	1					BPKAD		
			Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pelaporan Dana Transfer	Dokumen	1	1	133.188.600	103.970.717,00				BPKAD	
			Validasi Pengesahan Perantugungjawaban Kegiatan	Jumlah Dokumen Pengesahan									BPKAD	
			Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemda	Dokumen	2	2	83.983.000	79.064.715,00				BPKAD	
			Penyusunan Raperda tentang Perantugungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Perantugungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2	2	148.606.000	140.047.354,00				BPKAD	
			Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perantugungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Penjabaran Perantugungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	2	2	122.825.000	113.411.298,00				BPKAD	
			Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akral	Sistem Informasi Akuntansi yang sudah diperbaharui	Dokumen	1	1	71.186.594	70.416.950,00				BPKAD	
			Penyusunan RKBM dan RKPBM	Jumlah SKPD yang dikelola	Dokumen	1	1	40.000.000	36.622.000,00				BPKAD	
			Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	Dokumen	2	2	300.000.000	285.064.248,00				BPKAD	
			Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	Dokumen	1	1	100.000.000	93.400.000,00				BPKAD	
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen	1	1	169.604.000	101.961.572,00				BPKAD	
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen	1	1	159.473.700	138.053.603,00				BPKAD	
			Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	Dokumen	1	1	230.000.000	227.267.000,00				BPKAD	
			Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang dikelola	Pemeliharaan	1	1	450.510.000	402.740.000,00				BPKAD	
			Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	2	2	419.537.200	346.193.053,00				BPKAD	
			Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	Orang	1	100	198.727.500	198.727.500,00				BPKAD	
			Sinergitas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang dikelola	Orang	1	100	441.519.000	425.263.507,00				BPKAD	
			Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan	Jumlah Dokumen LRA	Dokumen	1	1	297.081.000	286.028.500,00				BPKAD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penganggungja wab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020					
							Target	Rp	Realisasi	Target			Rp	Realisasi
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Penilaian BMD	Dokumen		1	327.000,000		315.708.000,00			BPKAD	
			Identifikasi Belanja Modal SKPD	Jumlah Dokumen Identifikasi BMD	Dokumen		1	75.990,200		56.243.600,00			BPKAD	
			Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Sistem Pengelolaan Aset yang diperbaharui	Dokumen		1	125.000,000		123.840.000,000			BPKAD	
			Inventarisasi Aset	Jumlah Dokumen rincian aset tanah untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset	Dokumen		1							
			Penyusunan Neraca Aset Daerah	Jumlah dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset yang akurat dan tepat waktu	Dokumen									
			Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	Dokumen		1							
TAHUN 2020														
			NON URUSAN (MUIB SKPD)											
Meningkatnya Kualitas Kinerja dengan Prinsip tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Meningkatnya kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah		Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan, Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	99,61			100%	Rp 4.096.543.000	Rp 3.907.799.829			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Bulan	12		692.066,000		673.228.629,00			BPKAD	
			Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12		1.474.661,000		1.365.100.000,00			BPKAD	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	19		31.500,000		28.057.000,00			BPKAD	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	75		657.979,000		854.675.450,00			BPKAD	
			Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Paket	1		94.650,000		72.600.000,00			BPKAD	
			Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Tenaga Operasional pengamanan	Paket	1		200.035,000		199.638.500,00			BPKAD	
			Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa Kebersihan	Paket	1		274.250,000		251.820.900,00			BPKAD	
			Pelayanan Ketatausahaan Se-Kabupaten Sumedang	Jumlah Sistem Informasi Perangkat Daerah	Paket	1		351.800,000		348.879.350,00			BPKAD	
			Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Profil BPKAD	Dokumen	1				113.800.000,00			BPKAD	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100%			100%	Rp 2.714.351.140	Rp 2.652.254.799			
			Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Gedung kantor yang dibangun	Paket	1				1.224.001.800	1.192.599.000,00			BPKAD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020					
							Target	Rp	Realisasi	Target			Rp	Realisasi
			Perataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	1			1	Rp 787.750.000	783.791.000,00	BPKAD		
			Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Halaman Gedung Kantor yang Ditata	Paket	1			1	Rp 208.800.000	207.223.000,00	BPKAD		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	Paket	1			1	Rp 245.650.000	231.347.799,00	BPKAD		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Paket	1			1	Rp 131.889.340	121.050.000,00	BPKAD		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapannya dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Perengkapan dan Peralatan Kantor/ Gedung Kantor yang dipelihara	Jenis	3			3	Rp 116.250.000	116.250.000,00	BPKAD		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	%	99,68			100%	Rp 73.200.000	Rp 71.080.000			
			Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah pakaian Dinas beserta Perengkapannya	stel				100		Rp 39.100.000	Rp 38.780.000,00	BPKAD	
			Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	stel				100		Rp 34.100.000	Rp 32.300.000,00	BPKAD	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	%	97,99			100%	Rp 59.400.000	Rp 53.150.000			
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	Paket	1			1		Rp 59.400.000	Rp 53.150.000,00	BPKAD	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja	%	99,19			100%	Rp 175.000.000	Rp 172.750.000			
					Persentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah	%				100%	Rp 100.000.000	Rp 97.772.100		
			Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD	Dokumen	6			6		Rp 113.600.000	Rp 112.750.000,00	BPKAD	
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Dokumen	12			12		Rp 100.000.000	Rp 97.772.100,00	BPKAD	
			Program Peningkatan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD	%	97,85			100%	Rp 201.500.000	Rp 201.365.000			
					Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD	%				100%	Rp 201.500.000	Rp 201.365.000,00		
			Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	6			6		Rp 201.500.000	Rp 201.365.000,00	BPKAD	
			Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	%	98,99			100%	Rp 27.500.000	Rp 27.500.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2019		Tahun 2020			
							Target	Rp	Target	Rp		
			URUSAN KEUANGAN	Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola	Dokumen	4			27.500.000	27.500.000,00	BPKAD	
				1. Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	%	100				100		
				2. Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran:	%	92				96,16		
				3. Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan aturan:	%	91				99,07		
				4. Tingkat Ketepatan Waktu Penyempaian LKOPD dan LKPJ:	%	85				100		
				5. Keakuratan Pentasusahaan Aset (Materiilias):	%	87				97,03		
			Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	Dokumen	3			228.777.000	172.774.776,00	BPKAD	
			Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Platon Anggaran Sementara APBD	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PRAS) Murni	Dokumen				207.870.000	193.515.948,00	BPKAD	
			Aistensi RKA SKPD/PPKD APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	SKPD	110			180.418.400	152.725.900,00	BPKAD	
			Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen APBD Perubahan	Dokumen	1			93.528.875	62.687.375,00	BPKAD	
			Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Dokumen APBD Murni	Dokumen	55			386.355.737	386.309.340,00	BPKAD	
			Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD	Jumlah SKPD yang Diverifikasi	SKPD	4			287.440.200	132.447.800,00	BPKAD	
			Penyusunan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Platon Anggaran Sementara Perubahan APBD	Jumlah Nota Kesepakatan (KUA dan PRAS) Perubahan	Dokumen	2			130.932.350	99.448.600,00	BPKAD	
			Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan Daerah	Sistem	3			208.362.300	114.396.300,00	BPKAD	
			Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Sosialisasi	Orang				617.039.200	423.257.100,00	BPKAD	
			Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemda	Dokumen	2			131.632.000	148.623.000,00	BPKAD	
			Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen				139.770.500	136.108.200,00	BPKAD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program (Outcome) dan kegiatan	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2018)	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2019		Tahun 2020				
							Target	Rp	Target	Rp			
			Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Aknual	Sistem Informasi Akuntansi yang sudah diperbaharui	Dokumen	1			1	75.000.000	71.550.000,00	BPKAD	
			Penyusunan RKBWD dan RKPBMW	Jumlah SKPD yang dikelola	Dokumen	1			2	13.650.000	13.650.000,00	BPKAD	
			Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Aset Pemerintah Daerah	Dokumen	2			4	414.765.750	400.669.050,00	BPKAD	
			Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	Dokumen	1			4	95.200.000	90.780.000,00	BPKAD	
			Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbadeng tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumbadeng tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen	1			2	474.593.300	333.984.788,00	BPKAD	
			Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	Orang	1			100	104.452.000	104.452.000,00	BPKAD	
			Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang dikelola	Pemeliharaan	1			1	411.928.550	402.645.550,00	BPKAD	
			Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	2			12	372.465.500	330.734.089,00	BPKAD	
			Sinergis Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang dikelola	Orang				100	389.161.500	365.652.400,00	BPKAD	
			Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan	Jumlah Dokumen LRA	Dokumen	1			12	185.661.600	185.081.100,00	BPKAD	
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Penilaian BMD	Dokumen				4	132.000.000	121.818.000,00	BPKAD	
			Pengelolaan sistem Informasi Pengelolaan Aset Daerah	Jumlah Sistem Pengelolaan Aset yang diperbaharui	Dokumen	1			2	231.660.250	228.707.750,00	BPKAD	
			Inventarisasi Aset	Jumlah Dokumen rindan aset tanah untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset	Dokumen	1			4	197.880.000	148.886.400,00	BPKAD	
			Penyusunan Neraca Aset Daerah	Jumlah dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset yang akurat dan tepat waktu	Dokumen				4	10.644.532	10.644.150,00	BPKAD	
			Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah	Jumlah SKPD Peserta Bimtek	Dokumen	1			100	71.501.700	69.669.700,00	BPKAD	

Tabel 6.1.b (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan dan Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2021
(Sesudah Perubahan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program (Outcome) dan kegiatan	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Pendanaan		Perangkat Daerah Peninggugjawab	Lokasi
							Tahun 2021	Rp		
Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)									Nomenklatur SOTK Lama	
	Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah									
		5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
				Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	100	310.000,000	BPKAD	
				Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	100	150.672.129,733	BPKAD	
				Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	100	153.000,000	BPKAD	
				Persentase Ketersediaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persen	100	100	150.580,000	BPKAD	
				Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Persen	100	100	150.580,000	BPKAD	
				Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Persen	100	100	1.284.643,000	BPKAD	
				Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Persen	100	100	428.100,000	BPKAD	
				Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Persen	100	100	2.040.530,000	BPKAD	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Persen	100	100	844.609.000,00	BPKAD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program (Outcome) dan kegiatan	Sakutan	Data Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Tahun 2021		
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	19	19	310.000.000	BPKAD	
		5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	120.000.000	BPKAD	
		5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2	30.000.000	BPKAD	
		5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	40.000.000	BPKAD	
		5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	8	8	120.000.000	BPKAD	
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	36	36	150.672.129.733	BPKAD	
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	12	12	150.572.129.733	BPKAD	
		5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			-	BPKAD	
		5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Akhir Tahun SKPD	Dokumen	12	12	100.000.000	BPKAD	
		5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	153.000.000	BPKAD	
		5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengamanan Pengamanan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	1	153.000.000	BPKAD	
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan			150.580.000	BPKAD	
		5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	100	100	-	BPKAD	
		5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	Laporan	24	24	30.000.000	BPKAD	
		5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	100	120.580.000	BPKAD	
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan			1.284.643.000	BPKAD	
		5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	1	1	225.139.000	BPKAD	
		5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Laporan	1	1	48.992.000	BPKAD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program (Outcome) dan kegiatan	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2021	Rp		
		5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Laporan	1	1	179.810.000	BPKAD	
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan	2	2	230.581.000	BPKAD	
		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Laporan	1	1	36.000.000	BPKAD	
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	502.121.000	BPKAD	
		5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	1	1	25.000.000	BPKAD	
		5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Laporan	2	2	37.000.000	BPKAD	
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan			428.100.000		
		5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	0	0	-	BPKAD	
		5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	0	0	-	BPKAD	
		5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Unit	30	30	324.390.000	BPKAD	
		5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	30	30	103.710.000	BPKAD	
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan			2.040.530.000		
		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Laporan	12	12	483.000.000	BPKAD	
		5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	1	1	-	BPKAD	
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	1.557.530.000	BPKAD	
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan			844.609.000		
		5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Laporan	1	1	242.570.000	BPKAD	
		5.02.01.2.09.03	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Laporan Pemeliharaan Mebel	Laporan	1	1	13.000.000	BPKAD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan sasaran, program (Outcome) dan kegiatan	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Pendanaan Tahun 2021		Perangkat Daerah Peninggijawab	Lokasi
							Target	Rp		
		5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laporan	2	2	165.750.000	BPKAD	
		5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Laporan	1	1	51.929.000	BPKAD	
		5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Laporan	1	1	371.360.000	BPKAD	
		05.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Persen		94	904.415.000	BPKAD	
				Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Persen		100	1.390.018.000	BPKAD	
				Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	Persen		92	1.183.648.000	BPKAD	
				Tingkat Ketepatan Waktu Penyempaian LKPD dan LKOPD	Persen		92	1.028.358.000	BPKAD	
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen pengendalian Anggaran	Dokumen	9	9	904.415.000	BPKAD	
				Dokumen Perencanaan Penganggaran	Dokumen	14	14	1.390.018.000	BPKAD	
		5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	Dokumen	2	2	206.375.000	BPKAD	
		5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS	Dokumen	2	2	155.740.000	BPKAD	
		5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Validasi RKA SKPD	Dokumen	1	1	136.830.000	BPKAD	
		5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Validasi Perubahan RKA SKPD	Dokumen	1	1	132.430.000	BPKAD	
		5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Validasi DPA SKPD	Dokumen	1	1	170.630.000	BPKAD	
		5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Validasi Perubahan DPA SKPD	Dokumen	1	1	133.690.500	BPKAD	
		5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen APBD	Dokumen	2	2	109.305.000	BPKAD	
		5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD	Dokumen	6	6	432.995.000	BPKAD	
		5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan	Dokumen	4	4	323.054.150	BPKAD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program (Outcome) dan kegiatan	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2021	Rp		
		5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pendapatan	Dokumen	1	1	91.683.350	BPKAD	
		5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Belanja Daerah	Dokumen	1	1	363.100.000	BPKAD	
		5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pembayaan	Dokumen	1	1	38.600.000	BPKAD	
		5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah	Dokumen	1	1		BPKAD	
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Dokumen	12	12	1.183.648.000	BPKAD	
		5.02.02.2.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	2	2	306.672.900	BPKAD	
		5.02.02.2.03.03	Penyajian pelaksanaan pengendalian dan pemberian anggaran kas dan SPD	Jumlah Validasi RAK Murni dan Perubahan, Jumlah prakiraan pengeluaran kas daerah dan jumlah pemberian SPD	Dokumen	2	2	62.761.000	BPKAD	
		5.02.02.2.03.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah koordinasi Laporan Konfirmasi Transfer /rekonsiliasi dana spesifik dan penyaluran dana spesifik (DAU)	Dokumen	3	3	92.144.600	BPKAD	
		5.02.02.2.03.06	Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemanfaatan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah koordinasi pelaksanaan transaksi non tunai	Dokumen	1	1	38.710.500	BPKAD	
		5.02.02.2.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga	Jumlah koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Dokumen	2	2	495.602.500	BPKAD	
		5.02.02.2.03.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Buku Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah	Dokumen	1	1	47.578.500	BPKAD	
		5.02.02.2.03.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pembinaan Penatausahaan	Dokumen	1	1	140.178.000	BPKAD	
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	628.944.000	BPKAD	
		5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	Dokumen	4	4	330.839.950	BPKAD	
		5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Register Penerimaan dan Register Pengeluaran	Jenis	2	2	52.516.100	BPKAD	
		5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	Jenis	3	3	75.799.500	BPKAD	
		5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan LRA Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jenis	1	1	114.619.600	BPKAD	
		5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Unaudited dan Audited	Dokumen	4	4	119.874.900	BPKAD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program (Outcome) dan kegiatan	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2021	Rp		
		5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prioriti dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Perda LPP APBD dan Perbup LPP APBD	Dokumen	4	4	106.444.000	BPKAD	
		5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Tindak lanjut BPK	Dokumen	1	1	9.168.250	BPKAD	
		5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Laporan Tim Majelis TGR	Dokumen				BPKAD	
		5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Analisa Laporan Keuangan Penda	Dokumen	1	1	56.737.200	BPKAD	
		5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Perbup Kebijakan Akuntansi dan Buku Perbup Bagian Akun Standar	Buku	2	2	95.352.800	BPKAD	
		5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Perbup Sisdur Akuntansi	Buku	1	1	11.289.200	BPKAD	
		5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pembinaan Akuntansi	Dokumen	1	1	261.490.900	BPKAD	
		5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pembinaan BLUD	Dokumen				BPKAD	
		5.02.02.2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	2	2	56.491.500	BPKAD	
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dokumen	12	12	468.051.024.666	BPKAD	
		5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Dokumen Penyaluran Bantuan Keuangan	Dokumen	2	2	354.295.727.300	BPKAD	
		5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dokumen Dana Darurat dan Mendesak	Dokumen	2	2	84.128.044.666	BPKAD	
		5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Dana Bagi hasil	Dokumen	4	4	29.627.252.700	BPKAD	
		5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan data lingkup keuangan daerah	Persen	92	92	68.574.050	BPKAD	
		5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	Jumlah Custom dalam Sistem	Pemeliharaan Sistem	1	1	68.574.050	BPKAD	
		05.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Keakuratan Penatausahaan Aset (Materai/alias)	Persen	89	89	1.629.181.000	BPKAD	
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	26	26	1.629.181.000	BPKAD	
		5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah SSH	Dokumen	1	1	350.000.000	BPKAD	
		5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Jumlah Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	2	50.000.000	BPKAD	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program (Outcome) dan kegiatan	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Pendanaan		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2021	Rp		
		5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah RKBMD dan RKPMBMD	Dokumen	2	2	20.000.000	BPKAD	
		5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	4	4	70.000.000	BPKAD	
		5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik daerah	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen	4	4	140.000.000	BPKAD	
		5.02.03.2.01.06	Inventarisasi barang Milik daerah	Jumlah Inventarisasi BMD	Dokumen	2	2	50.000.000	BPKAD	
		5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik daerah	Jumlah BMD Yang diamankan	Dokumen	1	1	309.681.000	BPKAD	
		5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah BA Penilaian BMD	Dokumen	2	2	155.000.000	BPKAD	
		5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BA Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan BMD	Dokumen	1	1	79.500.000	BPKAD	
		5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan Penghapusan barang Milik Daerah	Jumlah Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD	Dokumen	3	3	145.000.000	BPKAD	
		5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	Dokumen	1	1	100.000.000	BPKAD	
		5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang milik daerah	Jumlah Peretapan Status pengguna barang	Dokumen	1	1	20.000.000	BPKAD	
		5.02.03.2.01.13	pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Pembinaan Pengelolaan BMD	Dokumen	1	1	140.000.000	BPKAD	

Tabel 6.1.c (T-C.27)
 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Badan Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2023
 (Sesudah Perubahan)

1	2	3	4	5	6	7	Target Kinerja Program dan Pendanaan				13	14				
							Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan	Satuan	Satuan berdasarkan Keperindagri 050-5889 Tahun 2021	Tarjet	Rp	Tarjet	Rp	Tarjet	Rp	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kapasitas dan Peringkat Daerah	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Poin		A		A		A		BKAD	Kab. Sumedang		
							Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD	Kab. Sumedang		
							Nilai SAKIP Kabupaten	Kategori	A		A		A		BKAD	Kab. Sumedang
							SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	BB		A		A		BKAD	Kab. Sumedang
							Perentase Kebersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persan	100	278.624.000	100	310.000.000	100	588.624.000	BKAD	Kab. Sumedang
							Perentase Kebersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persan	100	129.057.306.177	100	130.100.000.000	100	259.157.306.177	BKAD	Kab. Sumedang
							Perentase Kebersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Persan	100	256.530.000.00	100	2.600.000.000.00	100	2.856.530.000.00	BKAD	Kab. Sumedang
							Perentase Kebersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memadai	Persan	100	241.060.000.00	100	290.000.000.00	100	491.060.000.00	BKAD	Kab. Sumedang
							Perentase Kebersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memadai	Persan	100	1.159.476.000.00	100	1.200.000.000.00	100	2.359.476.000.00	BKAD	Kab. Sumedang
							Perentase Kebersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Persan	100	331.590.000.00	100	280.000.000.00	100	621.590.000.00	BKAD	Kab. Sumedang
Perentase Kebersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Persan	100	1.690.590.000.00	100	1.700.000.000.00	100	3.390.590.000.00	BKAD	Kab. Sumedang							
Perentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Persan	100	458.940.000.00	100	485.000.000.00	100	943.940.000.00	BKAD	Kab. Sumedang							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan	Satuan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Parangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
								Tahun 2022		Tahun 2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen	24 Dokumen	278.624.000	24 Dokumen	310.000.000	24 Dokumen	588.624.000	BKAD	kab. Sumedang
		5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen	10 Dokumen	98.624.000	10 Dokumen	100.000.000	10 Dokumen	198.624.000	BKAD	kab. Sumedang
		5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	Jumlah Dokumen RKAS-SKPD dan Jumlah Dokumen Perubahan RKAS-SKPD		Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	50.000.000	BKAD	kab. Sumedang
		5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	50.000.000	BKAD	kab. Sumedang
		5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen	10 Dokumen	140.000.000	10 Dokumen	150.000.000	10 Dokumen	290.000.000	BKAD	kab. Sumedang
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dokumen	24 Dokumen	129.057.306.177	24 Dokumen	130.100.000.000	24 Dokumen	259.157.306.177	BKAD	kab. Sumedang
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Dokumen	12 Dokumen	128.962.306.177	12 Dokumen	130.000.000.000	12 Dokumen	258.962.306.177	BKAD	kab. Sumedang
		5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Dokumen	12 Dokumen	95.000.000	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	195.000.000	BKAD	kab. Sumedang
		5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester/ Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester/Akhir Tahun SKPD		Dokumen	12 Dokumen	95.000.000	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	195.000.000	BKAD	kab. Sumedang
		5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dokumen	1 Dokumen	256.530.000,00	1 Dokumen	2.600.000.000	1 Dokumen	2.856.530.000	BKAD	kab. Sumedang
		5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengamanan Pengamanan Barang Milik Daerah		Dokumen	1 Dokumen	256.530.000	1 Dokumen	2.600.000.000	1 Dokumen	2.856.530.000	BKAD	kab. Sumedang
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Laporan	12 Laporan	244.060.000,00	12 Laporan	250.000.000	12 Laporan	491.060.000	BKAD	kab. Sumedang
		5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Stel	100 Stel	102.860.000	100 Stel	105.000.000	100 Stel	207.860.000	BKAD	kab. Sumedang

Tujuan	Saaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, saaran, program, kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, saaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan	Satuan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Perencanaan						Peangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rencana Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		5.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Laporan	Dokumen	12 Laporan	35.000.000	12 Laporan	40.000.000	12 Laporan	75.000.000	BKAD	Kab. Sumedang
		5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	Orang	90 Orang	103.200.000	90 Orang	105.000.000	90 Orang	208.200.000	BKAD	Kab. Sumedang
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Laporan		68 Laporan	1.159.476.000,00	68 Laporan	1.200.000.000	68 Laporan	2.359.476.000	BKAD	Kab. Sumedang
		5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Paket	12 Laporan	213.547.000	12 Laporan	215.000.000	12 Laporan	427.547.000	BKAD	Kab. Sumedang
		5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Laporan	Paket	4 Laporan	45.000.000	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	95.000.000	BKAD	Kab. Sumedang
		5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Laporan	Paket	4 Laporan	200.000.000	4 Laporan	210.000.000	4 Laporan	410.000.000	BKAD	Kab. Sumedang
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Laporan	Paket	12 Laporan	128.109.000	12 Laporan	130.000.000	12 Laporan	258.109.000	BKAD	Kab. Sumedang
		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Laporan	Dokumen	12 Laporan	32.820.000	12 Laporan	35.000.000	12 Laporan	67.820.000	BKAD	Kab. Sumedang
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Laporan	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	360.000.000	12 Laporan	710.000.000	BKAD	Kab. Sumedang
		5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan	Dokumen	12 Laporan	15.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	35.000.000	BKAD	Kab. Sumedang
		5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Unit Kendaraan Perora	Laporan	Dokumen	12 Laporan	176.000.000	12 Laporan	180.000.000	12 Laporan	356.000.000	BKAD	Kab. Sumedang
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Laporan		2 Laporan	331.350.000,00	2 Laporan	290.000.000	2 Laporan	621.350.000	BKAD	Kab. Sumedang
		5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	BKAD	Kab. Sumedang

Tujuan	Saaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, saaran, program, kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, saaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Setoran	Setoran berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Pendaan						Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	450.000.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralkatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralkatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralkatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	1.711.530.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan	Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	3.990.590.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	479.400.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.911.190.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Laporan	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	943.940.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Laporan	Unit	1 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	406.500.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.01.2.09.03	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Laporan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Laporan	Unit	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Laporan	Unit	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	146.430.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Laporan	Unit	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	47.630.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Laporan	Unit	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	333.380.000	BKAD	Kab. Sumedang		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan				Opini BPK		Kategori		WTP		WTP			BKAD	Kab. Sumedang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan	Kategori	Status	Satuan berdasarkan Keppmendagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Pengaruh Daerah Penanggungjawab	Lokasi																																																																												
										Tahun 2022		Tahun 2023																																																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																																																														
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	PROGRAM PENGELUARAN KEUANGAN DAERAH	05.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tingkat ketepatan Waktu Penyempurnaan LKRPD dan LKOPP	Persen	95%	2.700.000.000	97%	3.110.000.000	97%	5.810.000.000	BKAD	Kab. Sumedang																																																																														
														Cakupan Dokumen Pengajuan Pembayaran yang sesuai dengan Aturan	Persen	95%	550.000.000.000	97%	610.000.000.000	97%	1.180.000.000.000	BKAD	Kab. Sumedang																																																																				
																								Ketepatan Waktu Proses Penganggaran	Persen	100%	2.230.000.000	100%	2.900.000.000	100%	5.130.000.000	BKAD	Kab. Sumedang																																																										
																																		Tingkat Akurasi Dokumen Penganggaran	Persen	95%	1.450.000.000	97%	1.690.000.000	97%	3.100.000.000	BKAD	Kab. Sumedang																																																
																																												Opini BPK terhadap laporan keuangan	Kategori	Tepat Waktu	WTP	Tepat Waktu	WTP	Tepat Waktu	BKAD	Kab. Sumedang																																							
																																																					Penetapan APBD tepat waktu	Status	Tepat Waktu	WTP	Tepat Waktu	WTP	Tepat Waktu	BKAD	Kab. Sumedang																														
																																																														Dokumen pengendalian Anggaran	Dokumen	9 Dokumen	1.450.000.000	9 Dokumen	1.690.000.000	9 Dokumen	3.100.000.000	BKAD	Kab. Sumedang																				
																																																																								Dokumen perencanaan Penganggaran	Dokumen	14 Dokumen	2.230.000.000	14 Dokumen	2.900.000.000	14 Dokumen	5.130.000.000	BKAD	Kab. Sumedang										
																																																																																		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen	2 Dokumen	275.000.000	2 Dokumen	325.000.000	2 Dokumen	600.000.000	BKAD	Kab. Sumedang
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	450.000.000	BKAD	Kab. Sumedang																																																																																		
										Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	500.000.000	BKAD	Kab. Sumedang																																																																								
																				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	275.000.000	1 Dokumen	455.000.000	BKAD	Kab. Sumedang																																																														
																														Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	475.000.000	BKAD	Kab. Sumedang																																																				
																																								Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	750.000.000	BKAD	Kab. Sumedang																																										
																																																		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	750.000.000	BKAD	Kab. Sumedang																																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Koperndagr 050-5889 Tahun 2021	Satuan	Satuan berdasarkan Koperndagr 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Peringkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Peringkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Perubahan APBD	Dokumen	Dokumen	6 Dokumen	600.000.000	6 Dokumen	1.150.000.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Keuangan	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	500.000.000	4 Dokumen	950.000.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	400.000.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	900.000.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pembayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembayaan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	900.000.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti PembinaanPenganggaran Daerah PemerintahKabupaten/Kota	Dokumen	Orang	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	1.000.000.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah		Dokumen		12 Dokumen	2.500.000.000	12 Dokumen	5.500.000.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.02.2.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	500.000.000	2 Dokumen	1.000.000.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.02.2.03.03	Penyusunan pelaksanaan pengendalian dan pemerhatian anggaran kas dan SPD	Jumlah Validasi RAK Murni dan Perubahan, Jumlah prakiraan pengeluaran kas daerah dan Jumlah pendapatan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pemerhatian Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	700.000.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.02.2.03.05	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah koordinasi laporan konfirmasi Transfer /rekonalisasi dana spesifik dan penyuluran dana spesifik (DAU)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	350.000.000	3 Dokumen	700.000.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.02.2.03.06	Koordinasi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah koordinasi pelaksanaan transaksi non tunai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	550.000.000	BKAD	Kab. Sumedang		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Keperndagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan	Satuan berdasarkan Keperndagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Pendanaan						Perangkat Daerah Pertanggungjawaban	Lokasi
								Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		5.02.02.2.03.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pemungutan/Pemotongan dan Penyerahan Perhitungan Pihak Ketiga	Jumlah koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyerahan Perhitungan Pihak Ketiga (PK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyerahan Perhitungan Pihak Ketiga (PK)	Dokumen	Laporan	2 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	500.000.000	2 Dokumen	900.000.000	BKAD	Kab. Samedang
		5.02.02.2.03.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pertanggungjawaban dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Buku Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	550.000.000	BKAD	Kab. Samedang
		5.02.02.2.03.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pembinaan Penatausahaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	Orang	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	800.000.000	BKAD	Kab. Samedang
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-LO dan Beban	Dokumen		2 Dokumen	1.800.000.000	2 Dokumen	2.085.000.000	2 Dokumen	3.885.000.000	BKAD	Kab. Samedang
		5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Register Penerimaan dan Register Pengeluaran	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jenis	Laporan	2 jenis	150.000.000	2 jenis	200.000.000	2 jenis	350.000.000	BKAD	Kab. Samedang
		5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembayaran, Pendapatan-LO dan Beban	Jenis	Dokumen	3 jenis	250.000.000	3 jenis	275.000.000	3 jenis	525.000.000	BKAD	Kab. Samedang
		5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan LRA Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jenis	Laporan	1 jenis	300.000.000	1 jenis	320.000.000	1 jenis	620.000.000	BKAD	Kab. Samedang
		5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Unaudited dan Audited	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Dokumen	Laporan	4 Dokumen	350.000.000	4 Dokumen	375.000.000	4 Dokumen	725.000.000	BKAD	Kab. Samedang
		5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Perda LPP APBD dan Perubah LPP APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	275.000.000	4 Dokumen	525.000.000	BKAD	Kab. Samedang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kependagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan	berdasarkan Kependagri 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Parangkar Daerah Peninggiwahab	Lokasi		
								Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkar Daerah	
								Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Tindak lanjut BPK	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.02.2.03.07	Koordinasi, sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Tim Majelis TGR	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Keuangan Daerah	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	325.000.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Analisa Laporan Keuangan Penda	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	325.000.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Perbup Kebijakan Akuntansi dan Buku Perbup Bagian Akun Standar	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Buku	Dokumen	2 buku	150.000.000	2 buku	325.000.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Perbup Sisdur Akuntansi	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Buku	Dokumen	1 buku	50.000.000	1 buku	125.000.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkar Daerah yang Mendapat Pembinaan Akuntansi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	Orang	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	820.000.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkar Daerah yang Mendapat Pembinaan BLUD	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Dokumen	Lembaga	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	250.000.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.02.2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen	Laporan	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	525.000.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.02.2.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsid	Jumlah dokumen kebijakan dan alokasi subsidi	Jumlah laporan hasil penyusunan kebijakan dan alokasi subsidi	Dokumen	Laporan	1 Dokumen	900.000.000	1 Dokumen	900.000.000	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Dokumen Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dokumen	Laporan	2 Dokumen	422.369.172.897	2 Dokumen	468.756.080.187	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dokumen Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Dokumen	Laporan	2 Dokumen	92.540.849.133	2 Dokumen	101.794.934.046	BKAD	Kab. Sumedang		
		5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Dokumen	Laporan	4 Dokumen	32.589.977.970	4 Dokumen	35.848.975.767	BKAD	Kab. Sumedang		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Keppresdirgr 050-5889 Tahun 2021	Satuan	Satuan berdasarkan Keppresdirgr 050-5889 Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
								Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		5.02.03.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Kabupaten Daerah	Persentase ketersediaan data lingkup kabupaten daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Persen	Dokumen	95%	100.000.000	97%	120.000.000	97%	220.000.000	BKAD	Kab. Samedang
		5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan	Jumlah Custom dalam Sistem	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Pemeliharaan Sistem	Dokumen	1 Pemeliharaan Sistem	100.000.000	1 Pemeliharaan Sistem	120.000.000	1 Pemeliharaan Sistem	220.000.000	BKAD	Kab. Samedang
		06.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kekurangan Penatausahaan Aset (Materiilias)	Kekurangan Penatausahaan Aset (Materiilias)	Persen	Dokumen	90%	1.844.950.000	91%	2.009.709.000	91%	3.854.659.000	BKAD	Kab. Samedang
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	Dokumen	26 Dokumen	1.844.950.000	26 Dokumen	2.009.709.000	26 Dokumen	3.854.659.000	BKAD	Kab. Samedang
		5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah SHH	Jumlah Standar Harga Yang Disusun	Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	385.000.000	1 Dokumen	393.764.000	1 Dokumen	778.764.000	BKAD	Kab. Samedang
		5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang milik Daerah dan Standar kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang milik Daerah dan Jumlah Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	60.500.000	2 Dokumen	115.500.000	BKAD	Kab. Samedang
		5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah RKBM/D dan RKPBM/D	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	33.000.000	2 Dokumen	63.000.000	BKAD	Kab. Samedang
		5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	77.000.000	4 Dokumen	84.700.000	4 Dokumen	161.700.000	BKAD	Kab. Samedang
		5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik daerah	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen	Laporan	4 Dokumen	154.000.000	4 Dokumen	169.400.000	4 Dokumen	323.400.000	BKAD	Kab. Samedang
		5.02.03.2.01.06	Inventarisasi barang Milik daerah	Jumlah inventarisasi BMD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah	Dokumen	Laporan	2 Dokumen	55.000.000	2 Dokumen	60.500.000	2 Dokumen	115.500.000	BKAD	Kab. Samedang
		5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik daerah	Jumlah BMD yang diamankan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Dokumen	Laporan	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	450.000.000	2 Dokumen	850.000.000	BKAD	Kab. Samedang
		5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah BA Penilaian BMD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Dokumen	Laporan	2 Dokumen	170.500.000	2 Dokumen	187.550.000	2 Dokumen	358.050.000	BKAD	Kab. Samedang
		5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah BA Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	Laporan	1 Dokumen	87.450.000	1 Dokumen	96.195.000	1 Dokumen	183.645.000	BKAD	Kab. Samedang
		5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, pemertasaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang Milik Daerah	Jumlah Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemertasaan, Pemindahtanganan Daerah, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik	Dokumen	Dokumen	3 Dokumen	145.000.000	3 Dokumen	159.500.000	3 Dokumen	304.500.000	BKAD	Kab. Samedang

1	2	3	4	5	6	7	Target Kinerja Program dan Pendanaan				13	14		
							Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program, kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Satuan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Peninggungswas	Lokasi			
							Target	Rp	Target	Rp				
		5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	121.000.000	1 Dokumen	231.000.000	BKAD	Kab. Sumedang
		5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang milik daerah	Jumlah Penetapan Status pengguna barang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1 Dokumen	22.000.000	1 Dokumen	24.200.000	1 Dokumen	46.200.000	BKAD	Kab. Sumedang
		5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Pengelolaan BMD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	1 Dokumen	154.000.000	1 Dokumen	169.400.000	1 Dokumen	323.400.000	BKAD	Kab. Sumedang

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII

7.1. Indikator Kinerja BKAD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan jangka menengah BKAD dalam RPJMD tertuang dalam Misi ke-4, yaitu "Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat", dengan tujuan ke-1, yaitu "Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan bebas KKN", dan dengan sasaran ke-1, yaitu "Meningkatnya kinerja keuangan daerah yang transparan dan akuntabel". Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD tersebut, maka dapat dirumuskan indikator kinerja sasaran RPJMD untuk BKAD Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja BKAD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
3	Nilai Sakip	B	B	BB	A	A	
4	Tingkat Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah	96.12%	96.15%	96.25%	96.50%	97%	
5	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	n/a	1	1	1	1	
6	Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	56.05	22	23	25	28	
						30	
						33	

Pada dasarnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menjadi pendukung bagi tercapainya tujuan dan sasaran diatas meskipun tidak secara langsung menjadi OPD utama yang membidik tujuan dan sasaran dimaksud. Secara khusus Badan Keuangan dan Aset Daerah lebih memfokuskan diri pada pencapaian tujuan, yaitu "Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah yang baik".

Berbagai strategi dan kebijakan lanjutan guna mendukung tercapainya indikator-indikator tersebut diatas akan terus diupayakan penerapannya melalui pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain:

1. Sumber daya manusia merupakan prioritas utama yang dikembangkan. Dalam rangka menciptakan Sumber Daya Manusia pengelola keuangan dan aset daerah yang memiliki kompetensi ditempuh dengan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan, seminar dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Peningkatan kualitas sistem informasi keuangan, aset dan perencanaan yang terintegrasi dan penataan kembali tata kelola pengelolaan asset daerah.
3. Dalam rangka mempertahankan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), ada beberapa kunci yang harus dilaksanakan yaitu, Komitmen, Konsisten, Aksi yang jelas serta Monitoring dan Evaluasi yang berkelanjutan. Semua pihak mulai dari Kepala Daerah, Kepala SKPD sampai para pelaksana harus berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut.

BAB VIII
PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah perlu disusun pedoman atau acuan kerja yang dinamakan dengan Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang ini dibuat sebagai salah satu bentuk perencanaan jangka menengah (5 Tahun) yang akan berlaku untuk periode tahun 2018 s.d 2023, di dalamnya berkaitan dengan isu strategis dan operasional. Renstra diharapkan dapat turut mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selanjutnya, Renstra akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Strategi, Sasaran dan Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya yang diselenggarakan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Guna keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan dan mengawasi seluruh agenda yang tertuang di dalamnya, sehingga bisa dijadikan dasar untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang baik tahunan maupun lima tahunan.

Renstra diharapkan dapat membantu dalam penentuan arah dan masa depan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, sehingga mampu mengevaluasi, memilih dan mengimplementasikan berbagai alternatif pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Ir. INE INAJAH, MSE., M.Sc
Pembina Tk II/VB
NIP. 19690315 199901 2 001



Sumedang, Januari 2022
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang,

BAB VIII PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah perlu disusun pedoman atau acuan kerja yang dinamakan dengan Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang ini dibuat sebagai salah satu bentuk perencanaan jangka menengah (5 Tahun) yang akan berlaku untuk periode tahun 2018 s.d 2023, di dalamnya berkaitan dengan isu strategis dan operasional. Renstra diharapkan dapat turut mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Selanjutnya, Renstra akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Strategi, Sasaran dan Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya yang diselenggarakan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Guna keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan dan mengawasi seluruh agenda yang tertuang di dalamnya, sehingga bisa dijadikan dasar untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang baik tahunan maupun lima tahunan.

Renstra diharapkan dapat membantu dalam penentuan arah dan masa depan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, sehingga mampu mengevaluasi, memilih dan mengimplementasikan berbagai alternatif pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.

Ir. INE INAJAH, MSE., M.Sc
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19690315 199901 2 001



Sumedang, Januari 2022
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang,

**BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2018-2023**

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2023 yang dihadiri Tim Penyusun, sebagaimana mana Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, *terlampir*.

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan maka disepakati bahwa :

<i>Kesatu</i>	:	Sistematisa Perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 telah memperhatikan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Subsistensi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah memuat: 1) tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan; 2) program dan kegiatan; 3) indikator dan target kinerja; dan 4) kerangka pendanaan.
<i>Kedua</i>	:	Perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan program dan kegiatan, serta pagu indikator dalam Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023
<i>Ketiga</i>	:	Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang telah diverifikasi akan dijadikan lampiran Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.
<i>Keempat</i>	:	Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, <i>sebagaimana Terlampir</i>

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perencana Ahli Muda,

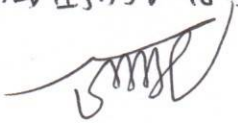
YOSEF DEDE SOLAEMAN, S.S., M.Si.
NIP. 19790511201001 1 002



Mengetahui,

Tim Verifikasi

Andi Astiana, S.P., M.B.
NIP. 19720829199803 2003



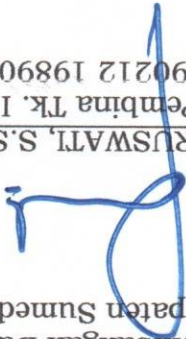
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sumedang,

Ir. INE INAJAH, M.SE., M.Sc.
Pembina TK. I/IVb
NIP. 19690315 199901 2 001



Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumedang,

Hj. TUTI RUSWATI, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19690212 198903 2 005



KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG,



I. INE INAJAH, M.SE, M.Sc.

Pembina TK I/IVb

NIP 19690315 199901 2 001

No	Jenis Kegiatan	Kesesuaian		(3)	(4)	(5)	(6)
		ada	tidak ada				
(1)	(2)						
16.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√					
17.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√					
18.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikator rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√					
19.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	√					
20.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kotasesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√					
21.	Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan	√					

Hasil Pengendalian dan Evaluasi

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Ir. INE INAJAH, M.SE, M.Sc.

Pembina TK I/IVb

NIP 19690315 199901 2 001

No	Jenis Kegiatan	Kesesuaian			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		ada	tidak ada	Faktor Penyebab Ketidakesesuaian						
16.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√								
17.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√								
18.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikator rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√								
19.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	√								
20.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kotasesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	√								
21.	Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	√								

Hasil Pengendalian dan Evaluasi

DOKUMEN LAIN YANG HARUS DISIAPKAN

No	Uraian	ada	Tidak ada	Tanggal Pengesahan	Tindak lanjut apabila tidak ada
1.	Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renstra PD Tahun 2018-2023	✓		Januari - Maret 2021	<i>M. S. S. S. S.</i>
2.	Berita Acara beserta lampirannya hasil Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023	✓		4 Januari 2022	
3.	Format E.68 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renstra	✓		7 Januari 2022	
4.	Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023	✓		7 Januari 2022	